



PEMERINTAH KOTA DUMAI  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

JL. Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran Walikota Dumai – Bagan Besar  
DUMAI

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI

NOMOR 700/ 60 /Bappedalitbang/2023

TENTANG

PENETAPAN PENILAIAN RISIKO KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI  
TAHUN 2023

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyebutkan bahwa kewajiban bagi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melakukan penilaian resiko;
- b. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai telah melakukan penilaian risiko kegiatan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Dumai tentang Penetapan Penilaian Risiko Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Walikota Dumai Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai ( Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 34 Seri E);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 26 Seri D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN PENILAIAN RISIKO KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI TAHUN 2023.
- KESATU : Penetapan Penilaian Risiko Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi perhatian oleh seluruh ASN dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 5 Juni 2023

a.n. WALIKOTA DUMAI  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai,



Drs. BUDHI HASNUL, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740213 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bpk. Walikota Dumai di Dumai.
2. Bpk. Sekretaris Daerah Kota Dumai di Dumai



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan. 2. Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi.	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sinkron Penyampaian dokumen perencanaan ke Provinsi tidak tepat waktu	RSO BAPPEDA LITBANG. RSO BAPPEDA LITBANG. 5.2022	Kepala Bappedalitbang Kepala Bappedalitbang	Kurang konsistennya Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan 1. Keterlambatan Perangkat Daerah menyampaikan data; 2. Belum tersedianya regulasi yang mengatur terkait sanksi bagi Perangkat Daerah yang terlambat menyampaikan data 3. Belum memiliki database time series yang tersimpan kedalam sistem e-planning (Sebelum ada SIPD)	Eksternal Internal Eksternal	Penyusunan dokumen Perencanaan tidak sesuai jadwal Jadwal penyusunan penganggaran menjadi terhambat	Bappedalitbang Pemerintah Kota Dumai
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil kelibangan yang implementatif	Hasil kelibangan tidak dapat diimplementasikan ke Perangkat Daerah	RSO BAPPEDA LITBANG. 6.2022	Kepala Bappedalitbang	1. Belum tertuangnya Rencana Induk Kelibangan dan Peta Jalan Inovasi kedalam RPJMD bab 4 pada permasalahan Daerah dan Isu Strategis 2. Belum tertuangnya hasil kelibangan dan inovasi kedalam RKPD dan DPA pada Perangkat Daerah	Eksternal Eksternal	Tidak dapat diimplementasikannya hasil kelibangan	Bappedalitbang

Dumai, Juni 2023  
 Dibuat Oleh Pemilik Risiko :  
 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
 Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai

Disetujui oleh :  
 Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah,  
 Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si  
 NIP. 19740213 199303 1 002

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si  
 NIP. 19740213 199303 1 002

**IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD**

<p><b>Nama Pemda</b> : Pemerintah Kota Dumai  <b>Nama OPD</b> : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  <b>Tahun Penilaian</b> : 2023  <b>Periode yang dinilai</b> : Periode RPJMD (Tahun 2021-2026)  <b>Tujuan Strategis</b> : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai  <b>Sasaran strategis OPD</b> : Terwujudnya konsistensi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta efektivitas pembangunan daerah  <b>Urusan Pemerintah</b> : Unsur Penujang Urusan Pemerintah (Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)</p>										
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Dampak **)
			Tahap	Uraian	Kode Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

**I Program : PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

<b>Kegiatan 1 : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>										
1	Sub Kegiatan 1.1 : Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Persiapan/Perencanaan	1. Kurangnya data dan informasi yang tersedia dalam penyusunan Rancangan Awal dokumen perencanaan pembangunan; 3. Lemahnya analisa kondisi umum daerah.	ROO.01. IF.R1	Kepala Bidang P2EPD	- sulitnya memperoleh data dari OPD terkait - Penyampaian data yang kurang lengkap dari OPD terkait - Masih kurangnya kemampuan SDM dalam melakukan analisis data yang tersedia	Eksternal	Terlambatnya pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; Kurang Optimalnya perumusan tema, prioritas pembangunan, strategi dan kebijakan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Pemerintah Kota Dumai
2	Sub Kegiatan 1.2 : Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Perencanaan/Pelaksanaan	1. Kurangnya keterwakilan stake holder pembangunan yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah; 2. Tidak adanya masukan dan saran penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RKPD/RPJMD.	ROO.02. IF.R1	Kepala Bidang P2EPD	- rendahnya tingkat kehadiran stake holder pembangunan - Tidak maksimalnya partisipasi dan keaktifan stake holder pembangunan dalam konsultasi publik	eksternal	Rancangan Awal RKPD/RPJMD hanya dari sisi teknokratik dan politis Rancangan Awal RKPD/RPJMD hanya dari sisi teknokratik dan politis	Stake holder pembangunan Stake holder pembangunan
3	Sub Kegiatan 1.3 : Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Perencanaan/Pelaksanaan	1. Rendahnya tingkat kehadiran Kepala OPD atau pejabat yang berwenang dalam menyusun program dan kegiatan di masing-masing OPD; 2. Lemahnya sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.	ROO.03. IF.R1	Kepala Bidang P2EPD	- kurangnya perhatian dari pejabat yang berwenang di masing-masing OPD terhadap proses perencanaan pembangunan - Lemahnya kapasitas aparatur Bappedalitbang dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan proses pembahasan	Eksternal	Kurangnya kualitas Rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Kurangnya kualitas Rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Pemko Dumai dan Stake Holder Pembangunan Pemko Dumai dan Stake Holder Pembangunan

No	Kegiatan	Risiko			Sebab *)			Dampak **)		
		Indikator Keluaran	Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
4	Sub Kegiatan 1.4 : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	1. Rendahnya tingkat kehadiran Kepala OPD atau pejabat yang berwenang dalam menyusun program dan kegiatan di masing-masing OPD di Musrenbang Kota; 2. Tidak optimalnya perumusan permasalahan dan prioritas pembangunan daerah serta perumusan program, kegiatan dan pagu indikatif yang diusulkan dari hasil musrenbang kecamatan;	ROO.04. IF.R1	Kepala Bidang P2EPD	- kurangnya perhatian dari pejabat yang berwenang di masing-masing OPD terhadap proses perencanaan pembangunan  - Lemahnya kapasitas aparatur Bappedalitbang dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan proses pembahasan musrenbang;	Eksternal	Kurang optimalnya peran kepala OPD atau pejabat yang berwenang dalam proses pembahasan musrenbang	Stake holder pembangunan dan Pemko Dumai
5	Sub Kegiatan 1.5 : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Penganggaran/ Pelaksanaan	1. Terlambatnya penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 2. Substansi dokumen perencanaan yang ditetapkan kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	ROO.05. IF.R1  ROO.05. IF.R2	Kepala Bidang P2EPD  Kepala Bidang P2EPD	- Terlambatnya pelaksanaan tahap-tahap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah  - keterbatasan kemampuan SDM Bappedalitbang penyusunan dokumen pelaksanaan	internal dan eksternal	sanksi untuk kepala daerah dan keterlambatan proses penganggaran daerah	Pemko Dumai
<b>Kegiatan 2 :</b>										
<b>Analisis Data dan InformasiPerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>										
6	Sub Kegiatan 2.1 : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	Perencanaan	1. Kurangnya data dasar tentang informasi pembangunan yang telah dilaksanakan 2. Hasil analisis data yang kurang akurat	ROO.06. IF.R1  ROO.06. IF.R2	Kepala Bidang P2EPD  Kepala Bidang P2EPD	- sulitnya memperoleh data dari OPD terkait  - keterbatasan kemampuan SDM Bappedalitbang dalam melakukan analisa terhadap data yang tersedia	eksternal	Sulitnya mengetahui kondisi awal sebelum dilaksanakan pembangunan	Bappedalitbang
<b>Kegiatan 3 :</b>										
<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>										
7	Sub Kegiatan 3.1 : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan pembangunan	Perencanaan/ Pelaksanaan	1. Dokumen laporan hasil money belum mengambarkan pencapaian kinerja pemerintah daerah 2. Terlambatnya penyampaian laporan hasil money ke instansi penerima laporan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku	ROO.07. IF.R1  ROO.07. IF.R2	Kepala Bidang P2EPD  Kepala Bidang P2EPD	- Lemahnya kapasitas SDM pada masing-masing OPD dan SDM Bappedalitbang dalam mengukur hail capaian kinerja  - Terlambatnya penyampaian laporan hasil kinerja dari masing-masing OPD yang diterima oleh Bappedalitbang	internal dan eksternal	Sulitnya mengetahui progres kinerja dalam rangka mencapai target pembangunan daerah	Pemko Dumai
			Pelaksanaan					Eksternal	mendapat teguran atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pemko Dumai

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab *)			Dampak **)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
<b>II Program :</b>										
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>										
<b>Kegiatan 4 :</b>										
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>										
8	Sub Kegiatan 4.1 : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan/ Penganggaran  Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaksanaan  Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaksanaan	1. Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. pemerintahan) dengan dokumen RKPD Kota Dumai  2. Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Pemerintahan  3. Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.08. IF.R1  ROO.08. IF.R2  ROO.08. IF.R3	Kepala Bidang PPM  Kepala Bidang PPM  Kepala Bidang PPM	- Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku  - Lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya  - keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	internal dan eksternal  internal dan eksternal  internal dan eksternal	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah  terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku  tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah	Pemko Dumai  Pemko Dumai  Pemko Dumai dan Stake Holder Pembangunan
9	Sub Kegiatan 4.2 : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	Perencanaan/ Penganggaran  Pelaksanaan	1. Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD  2. Kurang seriusnya OPD (bid. Pemerintahan) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.09. IF.R1  ROO.09. IF.R2	Kepala Bidang PPM  Kepala Bidang PPM	- Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD  - keterbatasan kemampuan SDM OPD	internal dan eksternal  Eksternal	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai  Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappedalitbang dan Pemko Dumai  Bappedalitbang dan Pemko Dumai
10	Sub Kegiatan 4.3 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Persiapan/ Pelaksanaan  Pelaksanaan	1. Data (bid. Pemerintahan) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;  2. Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Pemerintahan)	ROO.10. IF.R1  ROO.10. IF.R2	Kepala Bidang PPM  Kepala Bidang PPM	- Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya  - kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	internal dan eksternal  internal dan eksternal	menghambat pelaksanaan survey  hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Bappedalitbang  Bappedalitbang
11	Sub Kegiatan 4.4 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	Perencanaan/ Penganggaran  Pelaksanaan	1. Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Pemerintahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional  2. Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Pemerintahan) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.11. IF.R1  ROO.11. IF.R2	Kepala Bidang PPM  Kepala Bidang PPM	- Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional  - Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	internal dan eksternal  internal dan eksternal	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional  terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai	Pemko Dumai  Pemko Dumai

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab *)			Dampak **)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
12	Sub Kegiatan 4.5 : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan/ Penganggaran	1. Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. pembangunan manusia) dengan dokumen RKPD Kota Dumai 2. Tidak terkoordinasinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang pembangunan manusia 3. Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. pembangunan manusia) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.12. IF.R1  ROO.12. IF.R2  ROO.12. IF.R3	Kepala Bidang PPM  Kepala Bidang PPM  Kepala Bidang PPM	- Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku - lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya - keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	internal dan eksternal  internal dan eksternal  internal dan eksternal	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah  terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku  tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah	Pemko Dumai  Pemko Dumai  Pemko Dumai dan Stake Holder Pembangunan
13	Sub Kegiatan 4.6 : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	Perencanaan/ Penganggaran  Pelaksanaan	1. Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. pembangunan manusia) yang belum terakomodir dalam Renja OPD 2. Kurang seriusnya OPD (bid. pembangunan manusia) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.13. IF.R1  ROO.13. IF.R2	Kepala Bidang PPM  Kepala Bidang PPM	- Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD - keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD	internal dan eksternal  Eksternal	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai  Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappedalitbang dan Pemko Dumai  Bappedalitbang dan Pemko Dumai
14	Sub Kegiatan 4.7 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pembangunan manusia	Persiapan/ Pelaksanaan  Pelaksanaan	1. Data (bid. pembangunan manusia) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey; 2. Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. pembangunan manusia)	ROO.14. IF.R1  ROO.14. IF.R2	Kepala Bidang PPM  Kepala Bidang PPM	- Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya - kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	internal dan eksternal  internal dan eksternal	menghambat pelaksanaan survey  hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Bappedalitbang  Bappedalitbang
15	Sub Kegiatan 4.8 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	Perencanaan/ Penganggaran  Pelaksanaan	1. Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. pembangunan manusia) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional 2. Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. pembangunan manusia) propinsi/nasional yang bertlokasi di Kota Dumai	ROO.15. IF.R1  ROO.15. IF.R2	Kepala Bidang PPM  Kepala Bidang PPM	- Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional - Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	internal dan eksternal  internal dan eksternal	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional  terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai	Pemko Dumai  Pemko Dumai

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab *)			Dampak **)		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
<b>Kegiatan 5 :</b>											
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam</b>											
16	Sub Kegiatan 5.1 : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan/ Penggangan	1. Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. perencanaan) dengan dokumen RKPD Kota Dumai 2. Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang perencanaan 3. Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. perencanaan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.16. IF.R1	Kepala Bidang Perencanaan dan SDA	- Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku - lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya - keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	internal dan eksternal	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah	Pemko Dumai	
17	Sub Kegiatan 5.2 : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	Perencanaan/ Penggangan Pelaksanaan	1. Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. perencanaan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD 2. Kurang seriusnya OPD (bid. perencanaan) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 1. Data (bid. perencanaan) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey; 2. Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. perencanaan)	ROO.17. IF.R1 ROO.17. IF.R2	Kepala Bidang Perencanaan dan SDA Kepala Bidang Perencanaan dan SDA	- Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD - keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD - Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya - kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	internal dan eksternal Eksternal	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappedalitbang dan Pemko Dumai Bappedalitbang dan Pemko Dumai	
18	Sub Kegiatan 5.3 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang perencanaan	Persiapan/ Pelaksanaan Pelaksanaan	1. Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. perencanaan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional 2. Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. perencanaan) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.18. IF.R1 ROO.18. IF.R2	Kepala Bidang Perencanaan dan SDA Kepala Bidang Perencanaan dan SDA	- Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional - Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	internal dan eksternal	menghambat pelaksanaan survey hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Bappedalitbang Bappedalitbang	
19	Sub Kegiatan 5.4 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perencanaan	Perencanaan/ Penggangan Pelaksanaan	1. Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. perencanaan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional 2. Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. perencanaan) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.19. IF.R1 ROO.19. IF.R2	Kepala Bidang Perencanaan dan SDA Kepala Bidang Perencanaan dan SDA	- Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional - Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	internal dan eksternal	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional	Pemko Dumai Pemko Dumai	

No	Kegiatan	Risiko			Sebab *)			Dampak **)		Pihak yang Terkena
		Indikator Keluaran	Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
20	Sub Kegiatan 5.5 : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaksanaan	1. Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. SDA) dengan dokumen RKPDP Kota Dumai 2. Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang SDA 3. Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. SDA) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.20. IF.R1 ROO.20. IF.R2 ROO.20. IF.R3	Kepala Bidang Perencanaan dan SDA Kepala Bidang Perencanaan dan SDA Kepala Bidang Perencanaan dan SDA	- Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku - lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya - keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	internal dan eksternal internal dan eksternal internal dan eksternal	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah	Pemko Dumai Pemko Dumai Pemko Dumai dan Stake Holder Pembangunan
21	Sub Kegiatan 5.6 : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	Perencanaan/ Penganggaran	1. Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. SDA) yang belum terakomodir dalam Renja OPD 2. Kurang seriusnya OPD (bid. SDA) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.21. IF.R1 ROO.21. IF.R2	Kepala Bidang Perencanaan dan SDA Kepala Bidang Perencanaan dan SDA	- Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPDP - keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD	internal dan eksternal Eksternal	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPDP Kota Dumai Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPDP Kota Dumai	Bappedalitbang dan Pemko Dumai Bappedalitbang dan Pemko Dumai
22	Sub Kegiatan 5.7 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang SDA	Persiapan/ Pelaksanaan	1. Data (bid. SDA) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey; 2. Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. SDA)	ROO.22. IF.R1 ROO.22. IF.R2	Kepala Bidang Perencanaan dan SDA Kepala Bidang Perencanaan dan SDA	- Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya - kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	internal dan eksternal internal dan eksternal	menghambat pelaksanaan survey hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Bappedalitbang Bappedalitbang

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab *)			Dampak **)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
<b>Kegiatan 6 : Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>										
23	Sub Kegiatan 6.1 : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan/ Penganggaran	1. Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen RKPD Kota Dumai 2. Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Infrastruktur 3. Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.23. IF.R1	Kepala Bidang Infrastwil	- Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku - Lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya	internal dan eksternal	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah	Pemko Dumai
24	Sub Kegiatan 6.2 : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	Perencanaan/ Penganggaran	1. Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD 2. Kurang seriusnya OPD (bid. Infrastruktur) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24. IF.R1	Kepala Bidang Infrastwil	- Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD - keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD	internal dan eksternal	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappedalitbang dan Pemko Dumai
25	Sub Kegiatan 6.3 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Infrastruktur	Persiapan/ Pelaksanaan	1. Data (bid. Infrastruktur) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey; 2. Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Infrastruktur)	ROO.25. IF.R1	Kepala Bidang Infrastwil	- Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya - kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	internal dan eksternal	menghambat pelaksanaan survey hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Bappedalitbang
26	Sub Kegiatan 6.4 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	Perencanaan/ Penganggaran	1. Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional 2. Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Infrastruktur) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.26. IF.R1	Kepala Bidang Infrastwil	- Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional - Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	internal dan eksternal	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional	Pemko Dumai
			Penganggaran/ Pelaksanaan	2. Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Infrastruktur) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.26. IF.R2	Kepala Bidang Infrastwil		internal dan eksternal	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai	Pemko Dumai

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab *)			Dampak **)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
27	Sub Kegiatan 6.5 : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Perencanaan/ Penganggaran	1. Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen RKPD Kota Dumai 2. Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Kewilayahan 3. Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.27. IF.R1	Kepala Bidang Infracwil	- Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku - lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya - keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	internal dan eksternal	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah	Pemko Dumai
28	Sub Kegiatan 6.6 : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah bidang Kewilayahan yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah	Perencanaan/ Penganggaran	1. Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD 2. Kurang seriusnya OPD (bid. Kewilayahan) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 1. Data (bid. Kewilayahan) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey; 2. Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Kewilayahan)	ROO.28. IF.R1	Kepala Bidang Infracwil	- Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD - keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD - Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya - kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	internal dan eksternal	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappedalitbang dan Pemko Dumai Bappedalitbang dan Pemko Dumai
29	Sub Kegiatan 6.7 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Kewilayahan	Persiapan/ Pelaksanaan	1. Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional 2. Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Kewilayahan) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.29. IF.R1	Kepala Bidang Infracwil	- Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional - Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	internal dan eksternal	hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Bappedalitbang
30	Sub Kegiatan 6.8 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan	Perencanaan/ Penganggaran	1. Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional 2. Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Kewilayahan) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.30. IF.R1	Kepala Bidang Infracwil	- Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional - Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	internal dan eksternal	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional	Pemko Dumai
			Penganggaran/ Pelaksanaan	2. Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Kewilayahan) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.30. IF.R2	Kepala Bidang Infracwil	- Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	internal dan eksternal	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai	Pemko Dumai

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap		Risiko		Pemilik	Sebab *)		Dampak **)	
			Uraian	Uraian	Uraian	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
<b>III PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>											
<b>Kegiatan 7 : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>											
31	Sub Kegiatan 7.1 : Pengelolaan Data Kelitmbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Data Kelitmbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Persiapan/ Pelaksanaan	1. Banyaknya data-data yang dibutuhkan dalam pengukuran tidak tersedia; 2. Kurangnya perhatian dari masing-masing OPD terhadap masalah kelitmbangan di OPD-nya.	ROO.31. IF.R1	Kepala Bidang Litbang	Data-data/ dokumen yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah penghasil Data tidak disampaikan dan tidak dipublish ke website perangkat Daerah tersebut;	eksternal	Rendahnya hasil pengukuran indeks Inovasi Daerah	Pemko Dumai	
			Persiapan/ Pelaksanaan		ROO.31. IF.R2	Kepala Bidang Litbang	Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan tentang masalah kelitmbangan di OPD	internal dan eksternal	sulitnya mengumpulkan data untuk masalah kelitmbangan	Bappedalitbang	
<b>Kegiatan 8 : Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>											
32	Sub Kegiatan 8.1 : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah dokumen Inovasi Teknologi	Persiapan/ Pelaksanaan	1. Kurangnya perhatian dari masing-masing kepala OPD terhadap perkembangan inovasi di OPD-nya 2. Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kurang Inovatif	ROO.32. IF.R1	Kepala Bidang Litbang	tidak tersedianya anggaran untuk pengembangan inovasi di OPD	eksternal	Rendahnya hasil pengukuran indeks inovasi daerah	Pemko Dumai	
			Pelaksanaan		ROO.32. IF.R2	Kepala Bidang Litbang	kurangnya perhatian tiap-tiap OPD dalam pengembangan inovasi di OPD-nya	internal dan eksternal	Pemerintah Kota Dumai termasuk dalam katagori Daerah Kurang Inovatif	Bappedalitbang dan Pemko Dumai	
33	Sub Kegiatan 8.2 : Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitmbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitmbangan	Persiapan/ Pelaksanaan	1. Kurangnya perhatian dari masing-masing kepala OPD terhadap perkembangan inovasi di OPD-nya 2. Kurangnya minat dan perhatian dari ASN di setiap OPD untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengembangan inovasi	ROO.33. IF.R1	Kepala Bidang Litbang	tidak tersedianya anggaran untuk pengembangan inovasi di OPD	eksternal	Rendahnya hasil pengukuran indeks inovasi daerah	Pemko Dumai	
			Pelaksanaan		ROO.33. IF.R2	Kepala Bidang Litbang	kurangnya perhatian tiap-tiap OPD dalam pengembangan inovasi di OPD-nya	internal dan eksternal	Pemerintah Kota Dumai termasuk dalam katagori Daerah Kurang Inovatif	Bappedalitbang dan Pemko Dumai	

Dumai, Juni 2023

Dibuat oleh Pemilik Risiko :

- MUNADI AHMADI, ST, M.Sc, M.Eng/NIP. 19801025 200501 1 009 ( )
- ARIKE TRESMITA, S.Pi. M.Si/NIP. 19770405 200112 2 003 ( )
- MUHAMMAD FAKHRI, ST, M.Ec.Dev/NIP. 19810629 200604 1 013 ( )
- INSANI TAQWA SAILI, ST/NIP. 19870929 201001 1 006 ( )
- JAYA HANDAYANA, SE, MM/NIP. 19770308 200904 1 001 ( )

Disetujui Oleh :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai

Dr. EUDHI HASNUL, M.Si  
NIP. 19740213 199303 1 002

## HASIL ANALISIS RISIKO

**Nama Pemda** : Pemerintah Kota Dumai  
**Nama OPD** : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
**Tahun Penilaian** : 2023  
**Periode yang dinilai** : Periode RPJMD (Tahun 2021-2026)  
**Tujuan Strategis** : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai  
**Sasaran strategis OPD** : Terwujudnya konsistensi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta efektivitas pembangunan daerah  
**Urusan Pemerintahan** : Usur Penujang Urusan Pemerintah (Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Uraian	Existing Control/Pengendalian yang ada			Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko				
<b>II. Risiko Operasional</b>													
<b>1 Sub Kegiatan 1.1 : Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah</b>													
1	Kurangnya data dan informasi yang tersedia dalam penyusunan Rancangan Awal dokumen perencanaan pembangunan;	ROO.01. IF.R1	2	2	7	Mengumpulkan data dari berbagai sumber yang tersedia secara bertahap sebelum jadwal penyusunan Ranwal dimulai, sesuai dengan kondisi data yg dibutuhkan	Masih danya beberapa data yang sulit untuk diperoleh terkait dengan capaian pembangunan tahun sebelumnya	2	1	3	√		
3	Lemahnya analisa kondisi umum daerah.	ROO.01. IF.R2	2	1	3	Mengumpulkan data dari tiap-tiap OPD beserta dengan analisisnya dengan sistem jemput bola, tidak hanya menunggu dan meningkatkan kapasitas SDM Bappedalitbang dalam menganalisa data yang tersedia	Masih adanya beberapa data yang analisisnya masih kurang tepat	1	1	1			
<b>2 Sub Kegiatan 1.2 : Pelaksanaan Konsultasi Publik</b>													
1	Kurangnya keterwakilan stake holder pembangunan yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;	ROO.02. IF.R1	2	2	7	memberikan fasilitas dan bantuan bagi stake holder pembangunan yang menghadiri konsultasi publik					√		
2	Tidak adanya masukan dan saran penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RKPJ/ RPJMD.	ROO.02. IF.R2	1	2	2	memberikan kesempatan dan penjelasan agar setiap stake holder yang hadir dapat aktif menyampaikan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Awal dokumen perencanaan pembangunan daerah							
<b>3 Sub Kegiatan 1.3 : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD</b>													
1	Rendahnya tingkat kehadiran Kepala OPD atau pejabat yang berwenang dalam menyusun program dan kegiatan di masing-masing OPD;	ROO.03. IF.R1	2	2	7	Memberikan penekanan kepada pimpinan OPD untuk dapat menghadiri kegiatan ini tanpa diwakili/diwakili oleh pejabat yang dapat mengambil keputusan	Masih adanya pimpinan OPD yang belum dapat menghadiri Forum SKPD	1	2	2	√		
2	Lemahnya sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.	ROO.03. IF.R2	2	2	7	Meningkatkan kapasitas aparatur Bappedalitbang dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan proses pembahasan	masih terdapat misskoordinasi yang terjadi dalam proses pembahasan	1	1	1			

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control/Pengendalian yang ada			Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
<b>4 Sub Kegiatan 1.4 : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</b>												
1	Rendahnya tingkat kehadiran Kepala OPD atau pejabat yang berwenang dalam menyusun program dan kegiatan di masing-masing OPD di Musrenbang Kota;	ROO.04. IF.R1	2	2	7	memberikan fasilitas dan bantuan bagi stake holder pembangunan yang menghadapi musrenbang kota	masih adanya stake holder pembangunan yang belum dapat menghadapi kegiatan musrenbang kota	1	2	2		
2	Tidak optimalnya perumusan permasalahan dan prioritas pembangunan daerah serta perumusan program, kegiatan dan pagu indikatif yang diusulkan dari hasil musrenbang kecamatan;	ROO.04. IF.R2	2	2	7	Memberikan penekanan kepada pimpinan OPD untuk dapat menghadiri kegiatan ini tanpa diwakili/diwakili oleh pejabat yang dapat mengambil keputusan	Masih adanya pimpinan OPD yang belum dapat menghadiri Musrenbang Kota	2	1	3		√
<b>5 Sub Kegiatan 1.5 : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</b>												
1	Terlambatnya penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah;	ROO.05. IF.R1	3	2	11	mengusahakan agar setiap tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan tepat waktu	masih adanya beberapa tahapan yang waktu pelaksanaannya melewati waktu yang telah ditentukan	2	2	7		√
2	Substansi dokumen perencanaan yang ditetapkan kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	ROO.05. IF.R2	2	2	7	melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan meningkatkan kapasitas SDM Bappedalitbang dalam menganalisa risiko	masih kurang tepatnya analisa risiko yang dirumuskan	1	1	1		
<b>6 Sub Kegiatan 2.1 : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>												
1	Kurangnya data dasar tentang informasi pembangunan yang telah dilaksanakan	ROO.06. IF.R1	3	2	11	Mengumpulkan data dari masing-masing OPD tentang pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dengan sistem jemput bola/mendatangi langsung OPD tersebut.	masih adanya OPD yang belum responsif dalam memberikan data capaian pembangunan di OPD-nya	2	1	3		√
2	Hasil analisis data yang kurang akurat	ROO.06. IF.R2	2	2	7	Meningkatkan kapasitas aparatur Bappedalitbang dalam melakukan analisa terhadap data yang diterima dari OPD terkait, serta melibatkan tenaga ahli terkait dalam melakukan analisa terhadap data-data yang tersedia.	masih terdapat beberapa analisis data yang analisisnya kurang tepat.	2	1	3		
<b>7 Sub Kegiatan 3.1 : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota</b>												
1	Dokumen laporan hasil money belum menggambarkan pencapaian kinerja pemerintah daerah	ROO.07. IF.R1	3	2	11	Melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada SDM Bappedalitbang dan SDM di tiap-tiap OPD dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dan menyusun laporan money OPDnya masing-masing	masih terdapat pengukuran beberapa indikator capaian kinerja yang disampaikan oleh beberapa OPD belum tepat dan sesuai	2	1	3		√

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control/Pengendalian yang ada			Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (tisi dengan ceklist)
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
2	Terlambatnya penyampaian laporan hasil money ke instansi penerima laporan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku	ROO.07. IF.R2	2	2	7	menggesa seluruh OPD untuk segera menyampaikan laporan money-nya secara berkala sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan teguran kepada OPD yang terlambat menyerahkannya	masih adanya kendala bagi beberapa OPD dalam mengukur capaian kinerja, dan menyampaikan laoran moneynya tepat waktu ke Bappedalitbang	2	1	3		
<b>8</b>	<b>Sub Kegiatan 4.1 : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b>											
1	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. pemerintahan) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.08. IF.R1	3	2	11	Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan OPD mitra bidang PPM dalam melakukan penyusunan Renja OPD tersebut	masih adanya OPD yang kurang koordinasi terkait penyusunan Renja OPDnya ke bidang PPM	3	1	5		
2	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang Pemerintahan	ROO.08. IF.R2	3	3	14	Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan OPD mitra bidang PPM dalam melakukan penyusunan Renja OPD tersebut	masih adanya OPD yang kurang koordinasi terkait penyusunan Renja OPDnya ke bidang PPM	3	1	5	√	
3	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.08. IF.R3	3	2	11	melakukan rekapitulasi aspirasi masyarakat hari musrenbang dan reses sesuai dan menyampaikan kepada OPD sesuai tugas dan fungsinya, agar dimasukkan ke dalam dokumen Renja OPD tersebut	masih terdapat aspirasi masyarakat yang belum sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	2	1	3		
<b>9</b>	<b>Sub Kegiatan 4.2 : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</b>											
1	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.09. IF.R1	3	2	11	Melakukan asistensi dan komunikasi kepada OPD terkait, tentang kegiatan prioritas Kepala daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD	masih adanya OPD yang tidak melakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaannya	2	2	7	√	
2	Kurang seriusnya OPD (bid. Pemerintahan) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.09. IF.R2	2	1	3	mengkomunikasi dengan OPD mitra bid. pemerintahan untuk melakukan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan	masih adanya OPD yang tidak melakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaannya	2	1	3		
<b>10</b>	<b>Sub Kegiatan 4.3 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</b>											
1	Data (bid. Pemerintahan) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.10. IF.R1	3	2	11	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD mitra bid. pemerintahan sebelum melakukan survey lapangan	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	2	2	7	√	
2	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Pemerintahan)	ROO.10. IF.R2	2	3	10	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD mitra bid. pemerintahan sebelum melakukan survey lapangan	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	2	2	7		
<b>11</b>	<b>Sub Kegiatan 4.4 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</b>											
1	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Pemerintahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.11. IF.R1	4	3	17	Mengkoordinasikan setiap kegiatan bid. pemerintahan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta Renja OPD telah memperhatikan pula prioritas pembangunan propinsi dan nasional	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	3	3	14	√	

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control/Pengendalian yang ada			Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
2	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Pemerintahan) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.11. IF.R2	3	3	14	melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan instansi terkait pada pemerintah propinsi/pusat	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	3	2	11		
<b>12</b>	<b>Sub Kegiatan 4.5 : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b>											
1	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. pembangunan manusia) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.12. IF.R1	3	2	11	Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan OPD mitra bidang PPM dalam melakukan penyusunan Renja OPD tersebut	masih adanya OPD yang kurang koordinasi terkait penyusunan Renja OPDnya ke bidang PPM	3	1	5		
2	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang pembangunan manusia	ROO.12. IF.R2	3	3	14	Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan OPD mitra bidang PPM dalam melakukan penyusunan Renja OPD tersebut	masih adanya OPD yang kurang koordinasi terkait penyusunan Renja OPDnya ke bidang PPM	3	1	5	√	
3	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. pembangunan manusia) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.12. IF.R3	3	2	11	melakukan rekapitulasi aspirasi masyarakat hasil musrenbang dan reses sesuai dan menyampaikan kepada OPD sesuai tugas dan fungsinya, agar memasukkan ke dalam dokumen Renja OPD tersebut	masih terdapat aspirasi masyarakat yang belum sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	2	1	3		
<b>13</b>	<b>Sub Kegiatan 4.6 : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</b>											
1	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. pembangunan manusia) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.13. IF.R1	3	2	11	Melakukan asistensi dan komunikasi kepada OPD terkait, tentang kegiatan prioritas Kepala daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD	masih adanya OPD yang tidak melakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaannya	2	2	7	√	
2	Kurang seriusnya OPD (bid. pembangunan manusia) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.13. IF.R2	2	1	3	mengkomunikasi dengan OPD mitra bid. Pembangunan manusia untuk melakukan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan	masih adanya OPD yang tidak melakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaannya	2	1	3		
<b>14</b>	<b>Sub Kegiatan 4.7 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</b>											
	Data (bid. pembangunan manusia) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.14. IF.R1	3	2	11	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD mitra bid. Pembangunan manusia sebelum melakukan survey lapangan	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	2	2	7	√	
	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. pembangunan manusia)	ROO.14. IF.R2	2	3	10	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD mitra bid. Pembangunan manusia sebelum melakukan survey lapangan	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	2	2	7		
<b>15</b>	<b>Sub Kegiatan 4.8 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</b>											
1	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. pembangunan manusia) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.15. IF.R1	4	3	17	Mengkoordinasikan setiap kegiatan bid. pemerintahan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta Renja OPD telah memperhatikan pula prioritas pembangunan propinsi dan nasional	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	3	3	14	√	

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control/Pengendalian yang ada			Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
2	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. pembangunan manusia) propinsi/nasional yang bertlokasi di Kota Dumai	ROO.15. IF.R2	3	3	14	melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan instansi terkait pada pemerintah propinsi/pusat	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	3	2	11		
<b>16 Sub Kegiatan 5.1 : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b>												
1	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. perekonomian) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.16. IF.R1	3	2	11	Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan OPD mitra bidang Perencanaan dalam melakukan penyusunan Renja OPD tersebut	masih adanya OPD yang kurang koordinasi terkait penyusunan Renja OPDnya ke bidang Perencanaan	3	1	5		
2	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang perekonomian	ROO.16. IF.R2	3	3	14	Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan OPD mitra bidang Perencanaan dalam melakukan penyusunan Renja OPD tersebut	masih adanya OPD yang kurang koordinasi terkait penyusunan Renja OPDnya ke bidang Perencanaan	3	1	5	√	
3	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. perekonomian) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.16. IF.R3	3	2	11	melakukan rekapitulasi aspirasi masyarakat hari musrenbang dan reses sesuai dan menyampaikan kepada OPD sesuai tugas dan fungsinya, agar dimasukkan ke dalam dokumen Renja OPD tersebut	masih terdapat aspirasi masyarakat yang belum sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	2	1	3		
<b>17 Sub Kegiatan 5.2 : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan</b>												
1	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. perekonomian) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.17. IF.R1	3	2	11	Melakukan asistensi dan komunikasi kepada OPD terkait, tentang kegiatan prioritas Kepala daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD	masih adanya OPD yang tidak melakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaannya	2	2	7	√	
2	Kurang seriusnya OPD (bid. perekonomian) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.17. IF.R2	2	1	3	mengkomunikasi dengan OPD mitra bid. perekonomian untuk melakukan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan	masih adanya OPD yang tidak melakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaannya	2	1	3		
<b>18 Sub Kegiatan 5.3 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan</b>												
1	Data (bid. perekonomian) yang tidak lengkap/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.18. IF.R1	3	2	11	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD mitra bid. perekonomian sebelum melakukan survey lapangan	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	2	2	7	√	
2	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. perekonomian)	ROO.18. IF.R2	2	3	10	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD mitra bid. perekonomian sebelum melakukan survey lapangan	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	2	2	7		
<b>19 Sub Kegiatan 5.4 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan</b>												
1	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. perekonomian) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.19. IF.R1	4	3	17	Mengkoordinasikan setiap kegiatan bid. perekonomian pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta Renja OPD telah memperhatikan pula prioritas pembangunan propinsi dan nasional	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	3	3	14	√	

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control/Pengendalian yang ada		Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Uraian	Ceiah Pengendalian	Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
2	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. perekonomian) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.19. IF.R2	3	3	14	melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan instansi terkait pada pemerintah propinsi/pusat	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	3	2	11	
<b>20 Sub Kegiatan 5.5 : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b>											
1	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. SDA) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.20. IF.R1	3	2	11	Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan OPD mitra bidang Perekonomian dalam melakukan penyusunan Renja OPD tersebut	masih adanya OPD yang kurang koordinasi terkait penyusunan Renja OPDnya ke bidang Perekonomian	3	1	5	
2	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang SDA	ROO.20. IF.R2	3	3	14	Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan OPD mitra bidang SDA dalam melakukan penyusunan Renja OPD tersebut	masih adanya OPD yang kurang koordinasi terkait penyusunan Renja OPDnya ke bidang SDA	3	1	5	√
3	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. SDA) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.20. IF.R3	3	2	11	Melakukan rekapitulasi aspirasi masyarakat hari musrenbang dan reses sesuai dan menyampaikan kepada OPD sesuai tugas dan fungsinya, agar memasukkan ke dalam dokumen Renja OPD tersebut	masih terdapat aspirasi masyarakat yang belum sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	2	1	3	
<b>21 Sub Kegiatan 5.6 : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang SDA</b>											
1	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. SDA) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.21. IF.R1	3	2	11	Melakukan asistensi dan komunikasi kepada OPD terkait, tentang kegiatan prioritas Kepala daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD	masih adanya OPD yang tidak melakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaannya	2	2	7	√
2	Kurang seriusnya OPD (bid. SDA) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.21. IF.R2	2	1	3	mengkomunikasi dengan OPD mitra bid. SDA untuk melakukan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan	masih adanya OPD yang tidak melakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaannya	2	1	3	
<b>22 Sub Kegiatan 5.7 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang SDA</b>											
1	Data (bid. SDA) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.22. IF.R1	3	2	11	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD mitra bid. SDA sebelum melakukan survey lapangan	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	2	2	7	√
2	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. SDA)	ROO.22. IF.R2	2	3	10	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD mitra bid. SDA sebelum melakukan survey lapangan	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	2	2	7	
<b>23 Sub Kegiatan 6.1 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</b>											
1	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.23. IF.R1	3	2	11	Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan OPD mitra bidang Infrasturktur dalam melakukan penyusunan Renja OPD tersebut	masih adanya OPD yang kurang koordinasi terkait penyusunan Renja OPDnya ke bidang Infrasturktur	3	1	5	
2	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Infrastruktur	ROO.23. IF.R2	3	3	14	Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan OPD mitra bidang Infrasturktur dalam melakukan penyusunan Renja OPD tersebut	masih adanya OPD yang kurang koordinasi terkait penyusunan Renja OPDnya ke bidang Infrasturktur	3	1	5	√

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control/Pengendalian yang ada			Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (Isi dengan ceklist)
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
3	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.23. IF.R3	3	2	11	melakukan rekapitulasi aspirasi masyarakat harii musrenbang dan reses sesuai dan menyampaikan kepada OPD sesuai tugas dan fungsinya, agar memasukkan ke dalam dokumen Renja OPD tersebut	masih terdapat aspirasi masyarakat yang belum sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	2	1	3		
<b>24 Sub Kegiatan 6.2 : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</b>												
1	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24. IF.R1	3	2	11	Melakukan asistensi dan komunikasi kepada OPD terkait, tentang kegiatan prioritas Kepala daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD	masih adanya OPD yang tidak melakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaannya	2	2	7	√	
2	Kurang seriusnya OPD (bid. Infrastruktur) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.24. IF.R2	2	1	3	mengkomunikasi dengan OPD mitra bid. pemerintahan untuk melakukan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan	masih adanya OPD yang tidak melakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaannya	2	1	3		
<b>25 Sub Kegiatan 6.3 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</b>												
1	Data (bid. Infrastruktur) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.25. IF.R1	3	2	11	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD mitra bid. infraswil sebelum melakukan survey lapangan	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	2	2	7	√	
2	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Infrastruktur)	ROO.25. IF.R2	2	3	10	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD mitra bid. infraswil sebelum melakukan survey lapangan	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	2	2	7		
<b>26 Sub Kegiatan 6.4 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</b>												
1	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.26. IF.R1	4	3	17	Mengkoordinasikan setiap kegiatan bid. infrastruktur pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta Renja OPD telah memperhatikan pula prioritas pembangunan propinsi dan nasional	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	3	3	14	√	
2	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Infrastruktur) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.26. IF.R2	3	3	14	melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan instansi terkait pada pemerintah propinsi/pusat	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	3	2	11		
<b>27 Sub Kegiatan 6.5 : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b>												
1	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.27. IF.R1	3	2	11	Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan OPD mitra bidang Infrastruktur dalam melakukan penyusunan Renja OPD tersebut	masih adanya OPD yang kurang koordinasi terkait penyusunan Renja OPDnya ke bidang Infrastruktur	3	1	5		
2	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMMD/RKPD) bidang Kewilayahan	ROO.27. IF.R2	3	3	14	Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan OPD mitra bidang Infrastruktur dalam melakukan penyusunan Renja OPD tersebut	masih adanya OPD yang kurang koordinasi terkait penyusunan Renja OPDnya ke bidang Infrastruktur	3	1	5	√	

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control/Pengendalian yang ada			Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
3	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.27. IF.R3	3	2	11	melakukan rekapitulasi aspirasi masyarakat hari musrenbang dan reses sesuai dan menyampaikan kepada OPD sesuai tugas dan fungsinya, agar memasukkan ke dalam dokumen Renja OPD tersebut	masih terdapat aspirasi masyarakat yang belum sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	2	1	3	√	
<b>28 Sub Kegiatan 6.6 : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</b>												
1	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.28. IF.R1	3	2	11	Melakukan asistensi dan komunikasi kepada OPD terkait, tentang kegiatan prioritas Kepala daerah sesuai dengan tu poksi masing-masing OPD	masih adanya OPD yang tidak melakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaannya	2	2	7	√	
2	Kurang seriusnya OPD (bid. Kewilayahan) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.28. IF.R2	2	1	3	mengkomunikasi dengan OPD mitra bid. pemerintahan untuk melakukan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan	masih adanya OPD yang tidak melakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaannya	2	1	3		
<b>29 Sub Kegiatan 6.7 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</b>												
1	Data (bid. Kewilayahan) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.29. IF.R1	3	2	11	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD mitra bid. kewilayahan sebelum melakukan survey lapangan	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	2	2	7	√	
2	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Kewilayahan)	ROO.29. IF.R2	2	3	10	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD mitra bid. kewilayahan sebelum melakukan survey lapangan	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	2	2	7		
<b>30 Sub Kegiatan 6.8 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan</b>												
1	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.30. IF.R1	4	3	17	Mengkoordinasikan setiap kegiatan bid. kewilayahan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta Renja OPD telah memperhatikan pula prioritas pembangunan propinsi dan nasional	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	3	3	14	√	
2	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Kewilayahan) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.30. IF.R2	3	3	14	melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan instansi terkait pada pemerintah propinsi/pusat	Tidak sesuai kondisi di lapangan dengan data yang diperoleh dari OPD terkait	3	2	11		
<b>31 Sub Kegiatan 7.1 : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan</b>												
1	Banyaknya data-data yang dibutuhkan dalam pengukuran tidak tersedia;	ROO.31. IF.R1	4	3	17	Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh OPD untuk melakukan publikasi data-data yang diperlukan dalam pengukuran indeks kelitbangan di website OPD masing-masing secara berkala	masih adanya OPD yang belum memiliki tenaga pengelola website dan bahkan belum memiliki website OPDnya	3	3	14	√	
2	Kurangnya perhatian dari masing-masing OPD terhadap masalah kelitbangan di OPD-nya.	ROO.31. IF.R2	3	3	14	melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh OPD terkait masalah kelitbangan	masih adanya OPD yang belum memiliki perhatian terhadap masalah kelitbangan dengan kendala anggaran yang tidak tersedia	2	2	7		

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control/Pengendalian yang ada			Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
<b>32 Sub Kegiatan 8.1 : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif</b>												
1	Kurangnya perhatian dari masing-masing kepala OPD terhadap perkembangan inovasi di OPD-nya	ROO.32. IF.R1	3	3	14	Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh OPD untuk merumuskan langkah-langkah pengembangan inovasi di OPDnya	masih adanya OPD yang belum memiliki perhatian terhadap masalah inovasi dengan kendala anggaran yang tidak tersedia	2	2	7		
2	Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kurang Inovatif	ROO.32. IF.R2	4	3	17	mengadakan lomba inovasi tingkat daerah dengan harapan agar setiap OPD termotivasi untuk meningkatkan inovasi di OPDnya	masih adanya OPD yang belum memiliki perhatian terhadap masalah perkembangan inovasi dengan kendala anggaran yang tidak tersedia	3	3	14	√	
<b>33 Sub Kegiatan 8.2 : Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</b>												
1	Kurangnya perhatian dari masing-masing kepala OPD terhadap perkembangan inovasi di OPD-nya	ROO.33. IF.R1	3	3	14	Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh OPD untuk merumuskan langkah-langkah pengembangan inovasi di OPDnya	masih adanya OPD yang belum memiliki perhatian terhadap masalah inovasi dengan kendala anggaran yang tidak tersedia	2	3	10	√	
2	Kurangnya minat dan perhatian dari ASN di setiap OPD untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengembangan inovasi	ROO.33. IF.R2	3	3	14	mengadakan lomba inovasi tingkat daerah dengan harapan agar ASN di tiap OPD termotivasi untuk meningkatkan inovasi di OPDnya	masih adanya OPD yang belum memiliki perhatian terhadap masalah perkembangan inovasi dengan kendala anggaran yang tidak tersedia	2	2	7		

Dumai, Juni 2023

Dibuat oleh Pemilik Risiko :

- Disetujui Oleh :  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai
1. MUNADI AHMADI, ST, M.Sc, M.Eng/NIP. 19801025 200501 1 009 ( )  
2. ARIKE TRESMITA, S.Pi. M.Si/NIP. 19770405 200112 2 003 ( )  
3. MUHAMMAD FAKHRI, ST, M.Ec.Dev/NIP. 19810629 200604 1 013 ( )  
4. INSANI TAQWA SAILI, ST/NIP. 19870929 201001 1 006 ( )  
5. JAYA HANDAYANA, SE, MM/NIP. 19770308 200904 1 001 ( )

Dis: BUDHI HASNUL, M.Si  
NIP. 19740213 199303 1 002

## DAFTAR RISIKO PRIORITAS

**Nama Pemda** : Pemerintah Kota Dumai  
**Nama OPD** : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
**Tahun Penilaian** : 2023  
**Periode yang dinilai** : Periode RPJMD (Tahun 2021-2026)  
**Tujuan Strategis** : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai  
**Sasaran strategis OPD** : Terwujudnya konsistensi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta efektivitas pembangunan daerah  
**Urusan Pemerintahan** : Unsur Penunjang Urusan Pemerintah (Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)

No	Risiko Prioritas	Kede Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Kurangnya data dan informasi yang tersedia dalam penyusunan Rancangan Awal dokumen perencanaan pembangunan;	ROO.01.IF.R1	3	Kepala Bidang P2EPD	sulitnya memperoleh data dari OPD terkait	Terlambatnya pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2	Kurangnya keterwakilan stake holder pembangunan yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;	ROO.02.IF.R1	0	Kepala Bidang P2EPD	rendahnya tingkat kehadiran stake holder pembangunan	Rancangan Awal RKPD/RPJMD hanya dari sisi tekhokratik dan politis
3	Rendahnya tingkat kehadiran Kepala OPD atau pejabat yang berwenang dalam menyusun program dan kegiatan di masing-masing OPD;	ROO.03.IF.R1	2	Kepala Bidang P2EPD	kurangnya perhatian dari pejabat yang berwenang di masing-masing OPD terhadap proses perencanaan pembangunan	Kurangnya kualitas Rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah
4	Tidak optimalnya perumusan permasalahan dan prioritas pembangunan daerah serta perumusan program, kegiatan dan pagu indikatif yang diusulkan dari hasil musrenbang kecamatan;	ROO.04.IF.R2	3	Kepala Bidang P2EPD	Lemahnya kapasitas aparatur Bappedalitbang dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan proses pembaharuan musrenbang;	Kurangnya kualitas Rancangan Akhir RKPD dan Renja Perangkat Daerah
5	Terlambatnya penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah;	ROO.05.IF.R1	7	Kepala Bidang P2EPD	Terlambatnya pelaksanaan tahap-tahap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	sanksi untuk kepala daerah dan keterlambatan proses penganggaran daerah
6	Hasil analisis data yang kurang akurat	ROO.06.IF.R2	3	Kepala Bidang P2EPD	keterbatasan kemampuan SDM Bappedalitbang dalam melakukan analisa terhadap data yang tersedia	kurang tepatnya arah kebijakan pembangunan yang direncanakan
7	Dokumen laporan hasil monev belum menggambarkan pencapaian kinerja pemerintah daerah	ROO.07.IF.R1	3	Kepala Bidang P2EPD	Lemahnya kapasitas SDM pada masing-masing OPD dan SDM Bappedalitbang dalam mengukur hasil capaian kinerja	Sulitnya mengetahui progres kinerja dalam rangka mencapai target pembangunan daerah
8	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Pemerintahan	ROO.08.IF.R2	5	Kepala Bidang PPM	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku
9	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.09.IF.R1	7	Kepala Bidang PPM	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai
10	Data (bid. Pemerintahan) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.10.IF.R1	7	Kepala Bidang PPM	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	menghambat pelaksanaan survey
11	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Pemerintahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.11.IF.R1	14	Kepala Bidang PPM	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional
12	Tidak sinkronnya Dokumen Renja OPD (bid. pembangunan manusia) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.12.IF.R1	5	Kepala Bidang PPM	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah

No	Risiko Prioritas	Kede Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
13	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. pembangunan manusia) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.13.IF.R1	7	Kepala Bidang PPM	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai
14	Data (bid. pembangunan manusia) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.14.IF.R1	7	Kepala Bidang PPM	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	menghambat pelaksanaan survey
15	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. pembangunan manusia) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.15.IF.R1	14	Kepala Bidang PPM	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional
16	Tidak terkoordinasinya penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang perekonomian	ROO.16.IF.R2	5	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku
17	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. perekonomian) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.17.IF.R1	7	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai
18	Data (bid. perekonomian) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.18.IF.R1	7	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	menghambat pelaksanaan survey
19	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. perekonomian) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.19.IF.R1	14	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional
20	Tidak terkoordinasinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang SDA	ROO.20.IF.R2	5	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku
21	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. SDA) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.21.IF.R1	7	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai
22	Data (bid. SDA) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.22.IF.R1	7	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	menghambat pelaksanaan survey
23	Tidak terkoordinasinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Infrastruktur	ROO.23.IF.R2	5	Kepala Bidang Infrastwil	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku
24	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.24.IF.R1	7	Kepala Bidang Infrastwil	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai
25	Data (bid. Infrastruktur) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.25.IF.R1	7	Kepala Bidang Infrastwil	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	menghambat pelaksanaan survey
26	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.26.IF.R1	14	Kepala Bidang Infrastwil	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional
27	Tidak terkoordinasinya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Kewilayahan	ROO.27.IF.R2	5	Kepala Bidang Infrastwil	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku
28	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.28.IF.R1	7	Kepala Bidang Infrastwil	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai
29	Data (bid. Kewilayahan) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.29.IF.R1	7	Kepala Bidang Infrastwil	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	menghambat pelaksanaan survey

No	Risiko Prioritas	Kede Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
30	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.30.IF.R1	14	Kepala Bidang Infraswil	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional
31	Banyaknya data-data yang dibutuhkan dalam pengukuran tidak tersedia;	ROO.31.IF.R1	14	Kepala Bidang Litbang	Data-data/ dokumen yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah penghasil Data tidak disampaikan dan tidak dipublish ke website perangkat Daerah tersebut;	Rendahnya hasil pengukuran indeks Inovasi Daerah
32	Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kurang Inovatif	ROO.32.IF.R2	14	Kepala Bidang Litbang	kurangnya perhatian tiap-tiap OPD dalam pengembangan inovasi di OPD-nya	Pemerintah Kota Dumai termasuk dalam kategori Daerah Kurang Inovatif
33	Kurangnya perhatian dari masing-masing kepala OPD terhadap perkembangan inovasi di OPD-nya	ROO.33.IF.R1	10	Kepala Bidang Litbang	tidak tersedianya anggaran untuk pengembangan inovasi di OPD	Rendahnya hasil pengukuran indeks inovasi daerah

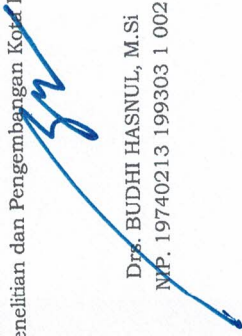
Dumai, Juni 2023

Dibuat oleh Pemilik Risiko :

1. MUNADI AHMADI, ST, M.Sc, M.Eng/NIP 19801025 200501 1 009 ( )
2. ARIKE TRESMITA, S.Pi. M.Si/NIP. 19770405 200112 2 003 ( )
3. MUHAMMAD FAKHRI, ST, M.Ec.Dev/NIP. 19810629 200604 1 013 ( )
4. INSANI TAQWA SAILI, ST/NIP. 19870929 201001 1 006 ( )
5. JAYA HANDAYANA, SE, MM/NIP. 19770308 200904 1 001 ( )

Disetujui Oleh :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai

  
Drs. BUDHI HASNUL, M.Si  
NIP. 19740213 199303 1 002

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan  
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

**Nama Pemda**  
 : Pemerintah Kota Dumai  
**Nama OPD**  
 : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
**Tahun Penilaian**  
 : 2023  
**Periode yang dinilai**  
 : Periode RPJMD (Tahun 2021-2026)  
**Tujuan Strategis**  
 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai  
**Sasaran strategis OPD**  
 : Terwujudnya konsistensi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta efektivitas pembangunan daerah  
**Urusan Pemerintahan**  
 : Unsur Penunjang Urusan Pemerintah (Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Indikator Output	Target Waktu Penyelesaian
1	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Pemerintahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.11.IF.R1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan tingkat provinsi, nasional dan kota dengan dokumen perencanaan OPD</li> <li>Melakukan pendampingan secara intens guna memantau sinkronisasi antara dokumen perencanaan tingkat provinsi, nasional dan kota dengan dokumen perencanaan OPD</li> </ul>	Kepala Bidang PPM	Dokumen, surat undangan	April, Juni, dan Nopember 2023
2	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. pembangunan manusia) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.15.IF.R1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan tingkat provinsi, nasional dan kota dengan dokumen perencanaan OPD</li> <li>Melakukan pendampingan secara intens guna memantau sinkronisasi antara dokumen perencanaan tingkat provinsi, nasional dan kota dengan dokumen perencanaan OPD</li> </ul>	Kepala Bidang PPM	Dokumen, surat undangan	April, Juni, dan Nopember 2023
3	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. perekonomian) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.19.IF.R1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan tingkat provinsi, nasional dan kota dengan dokumen perencanaan OPD</li> <li>Melakukan pendampingan secara intens guna memantau sinkronisasi antara dokumen perencanaan tingkat provinsi, nasional dan kota dengan dokumen perencanaan OPD</li> </ul>	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Dokumen, surat undangan	April, Juni, dan Nopember 2023
4	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.26.IF.R1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan tingkat provinsi, nasional dan kota dengan dokumen perencanaan OPD</li> <li>Melakukan pendampingan secara intens guna memantau sinkronisasi antara dokumen perencanaan tingkat provinsi, nasional dan kota dengan dokumen perencanaan OPD</li> </ul>	Kepala Bidang Infrastwil	Dokumen, surat undangan	April, Juni, dan Nopember 2023
5	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.30.IF.R1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan tingkat provinsi, nasional dan kota dengan dokumen perencanaan OPD</li> <li>Melakukan pendampingan secara intens guna memantau sinkronisasi antara dokumen perencanaan tingkat provinsi, nasional dan kota dengan dokumen perencanaan OPD</li> </ul>	Kepala Bidang Infrastwil	Dokumen, surat undangan	April, Juni, dan Nopember 2023
6	Banyaknya data-data yang dibutuhkan dalam pengukuran tidak tersedia;	ROO.31.IF.R1	Bekerjasama dengan Kominfo Kota Dumai dalam mengelola data yang berhubungan dengan kelibatan dan pengukuran indeks kelibatan melalui aplikasi Satu Data Kota Dumai	Kepala Bidang Litbang	Dokumen, aplikasi	Sep-23

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Indikator Output	Target Waktu Penyelesaian
7	Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kurang Inovatif	ROO.32.IF.R2	Lomba inovasi tingkat daerah, dan sosialisasi pengembangan inovasi di masing-masing OPD secara berkala	Kepala Bidang Litbang	Dokumen pelaksanaan kegiatan	akhir Desember 2023

Dumai, Juni 2023

Disetujui Oleh :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
 Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai



Dibuat oleh Pemilik Risiko :

1. MUNADI AHMADI, ST, M.Sc, M.Eng/NIP. 19801025 200501 1 009

2. ARIKE TRESMITA, S.Pi. M.Si/NIP. 19770405 200112 2 003

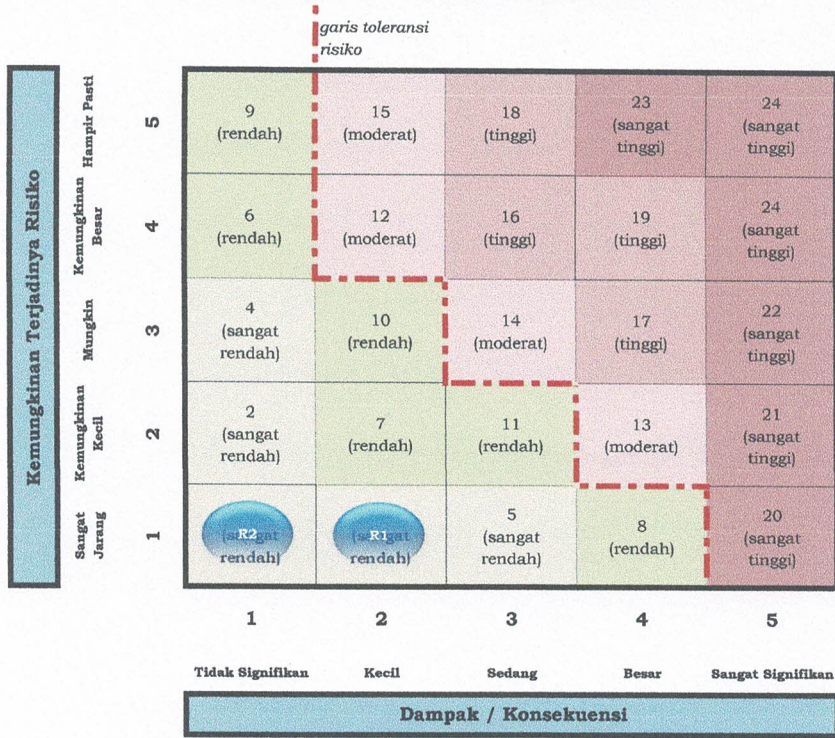
3. MUHAMMAD FAKHRI, ST, M.Ec.Dev/NIP. 19810629 200604 1 013

4. INSANI TAQWA SAILI, ST/NIP. 19870929 201001 1 006

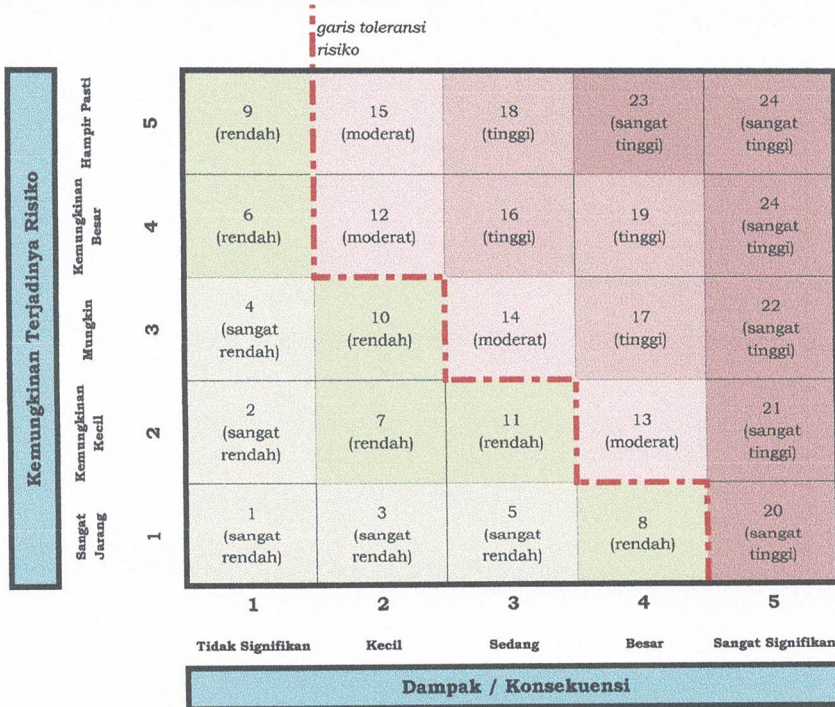
5. JAYA HANDAYANA, SE, MM/NIP. 19770308 200904 1 001

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si  
 NIP. 19740213 199303 1 002

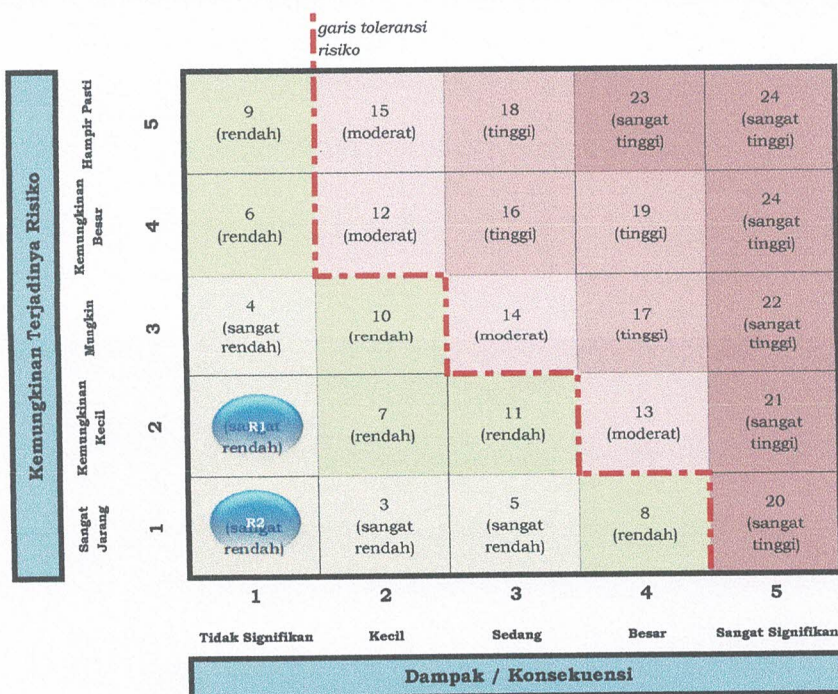
**Sub Kegiatan 1.1 : Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah**



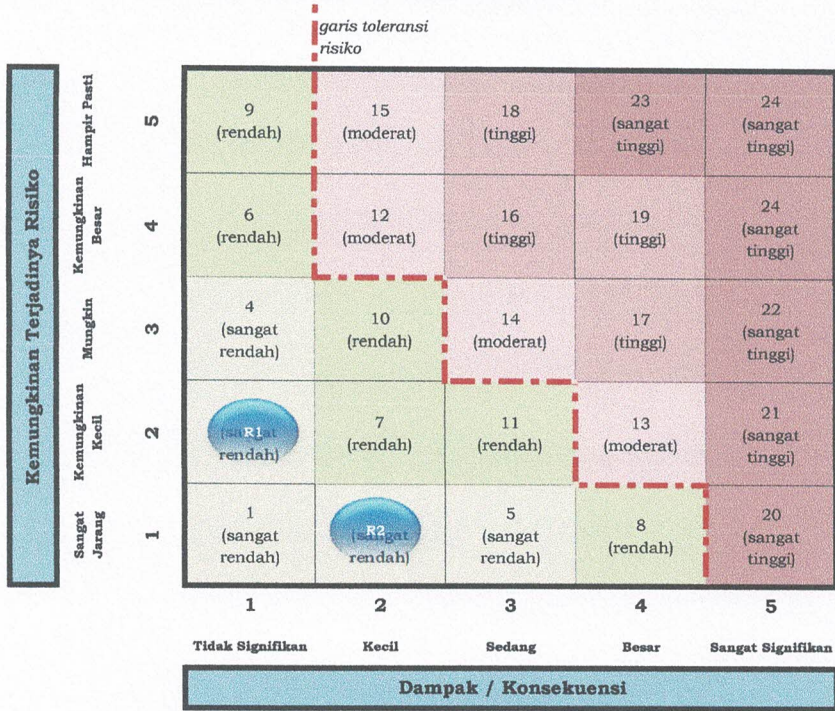
**Sub Kegiatan 1.2 : Pelaksanaan Konsultasi Publik**



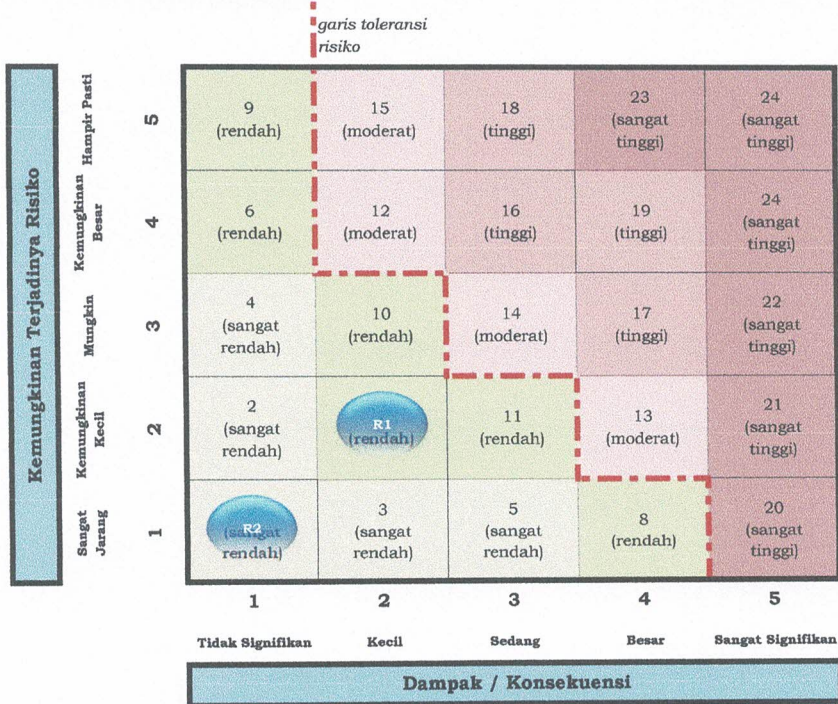
**Sub Kegiatan 1.3 : Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah**



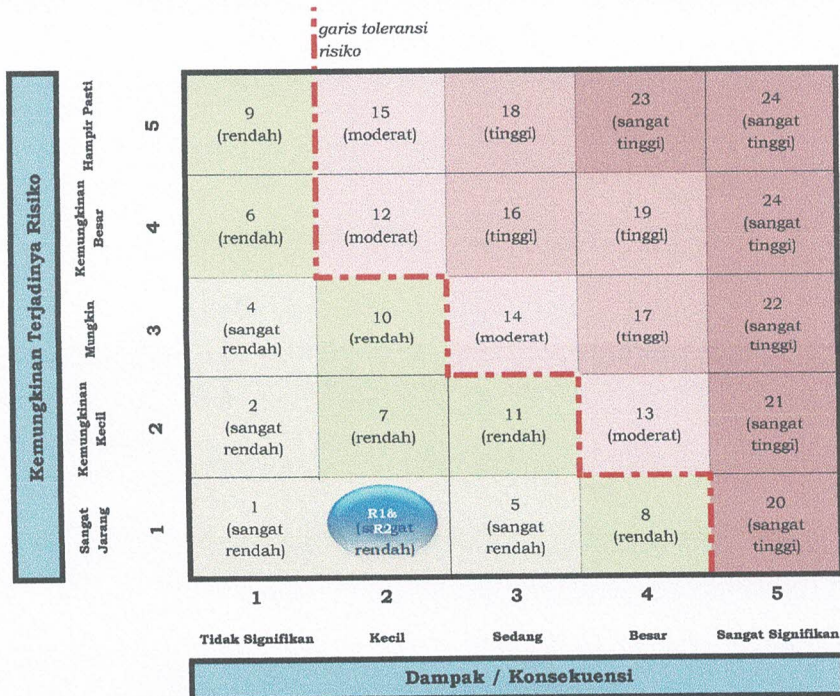
**Sub Kegiatan 1.4 : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota**



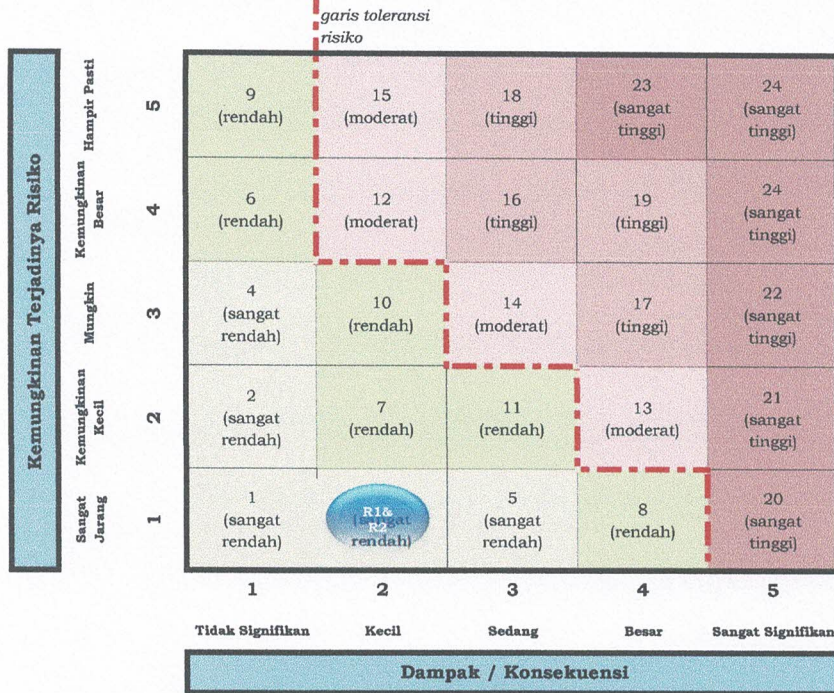
**Sub Kegiatan 1.5 : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota**



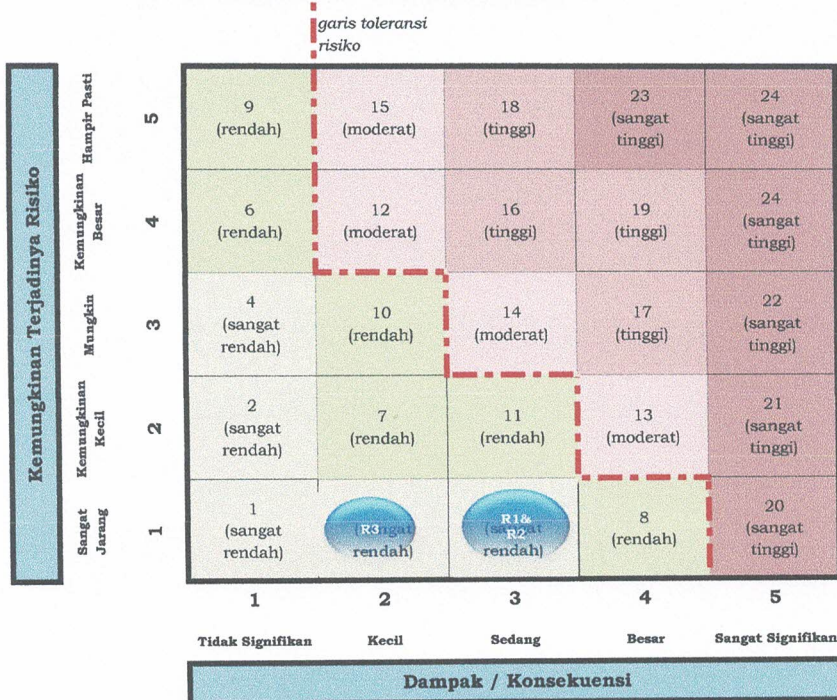
**Sub Kegiatan 2.1 : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**



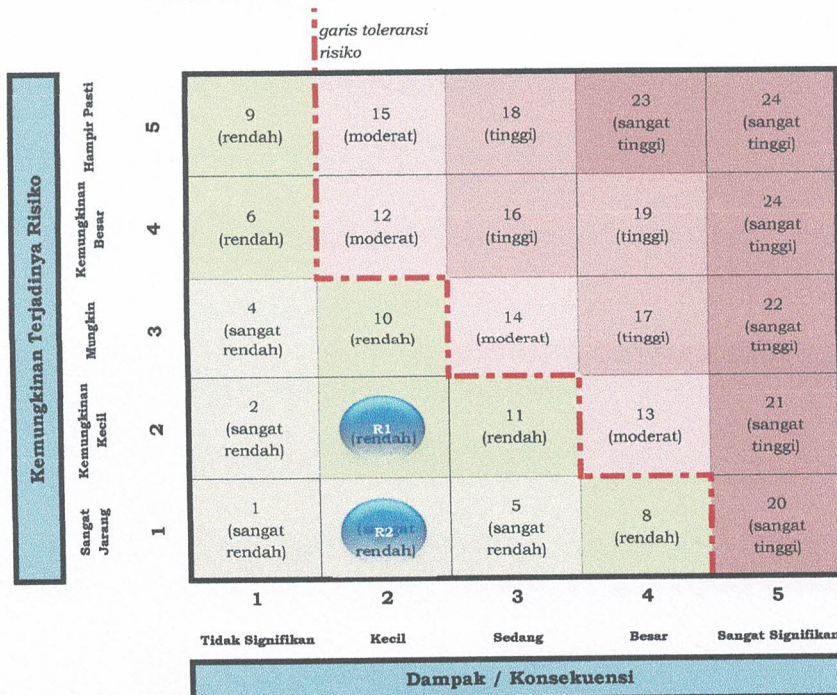
**Sub Kegiatan 3.1 : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota**



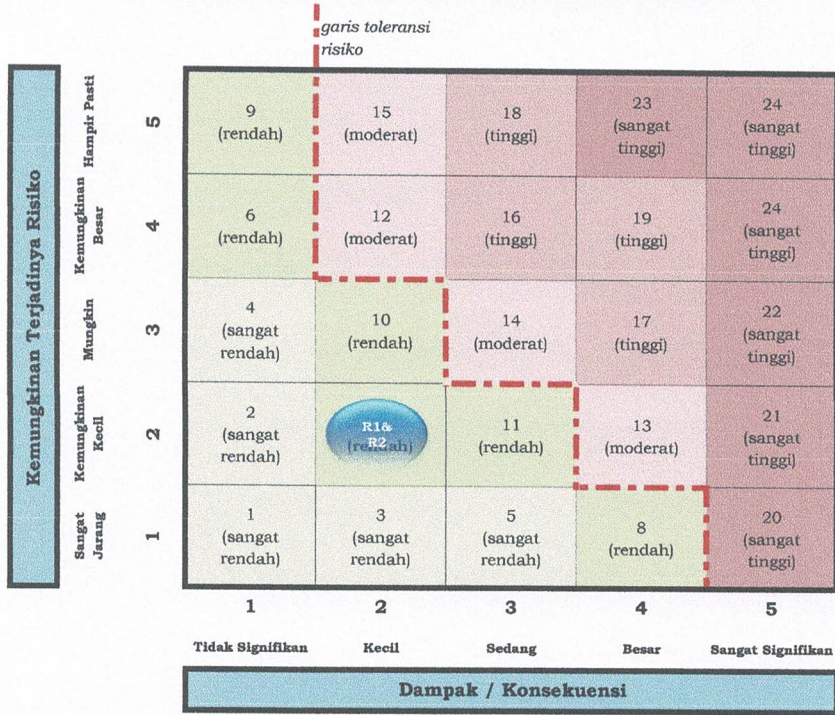
**Sub Kegiatan 4.1 : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**



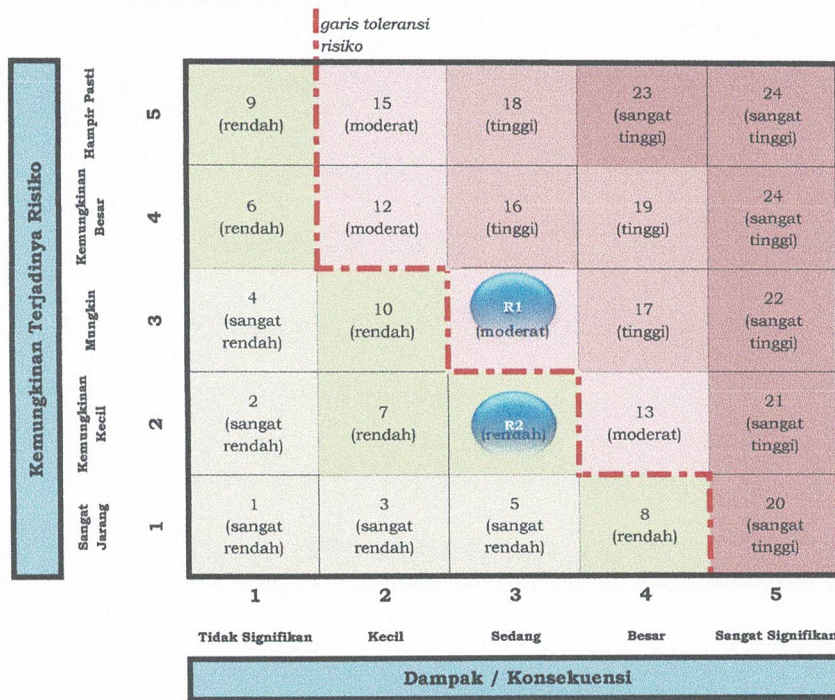
**Sub Kegiatan 4.2 : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan**



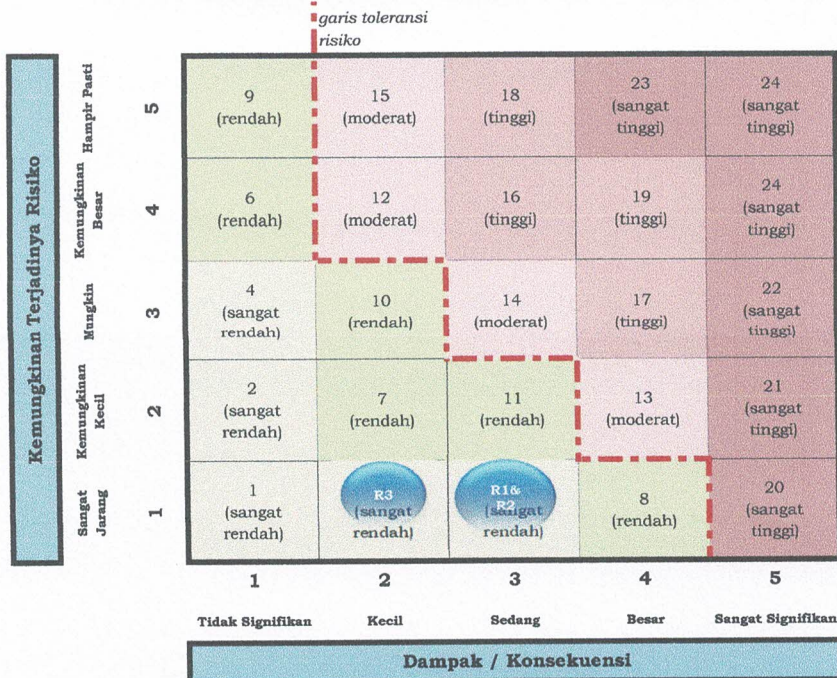
**Sub Kegiatan 4.3 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan**



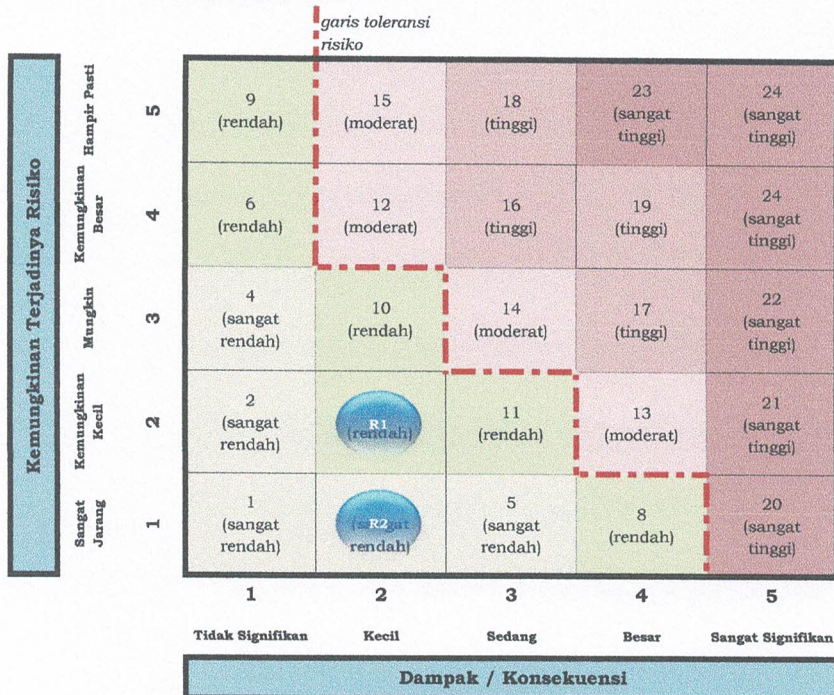
**Sub Kegiatan 4.4 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan**



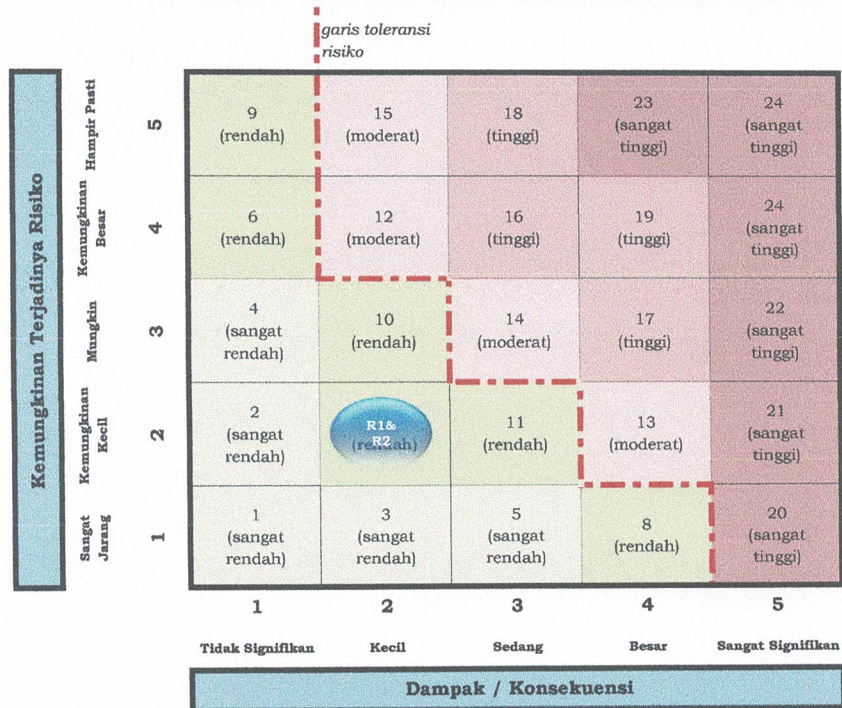
**Sub Kegiatan 4.5 : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**



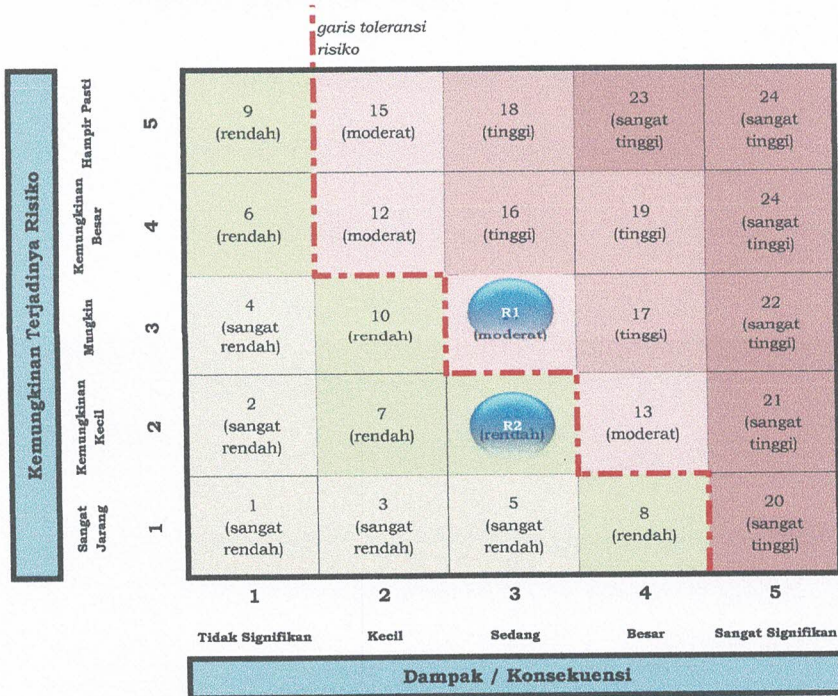
**Sub Kegiatan 4.6 : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia**



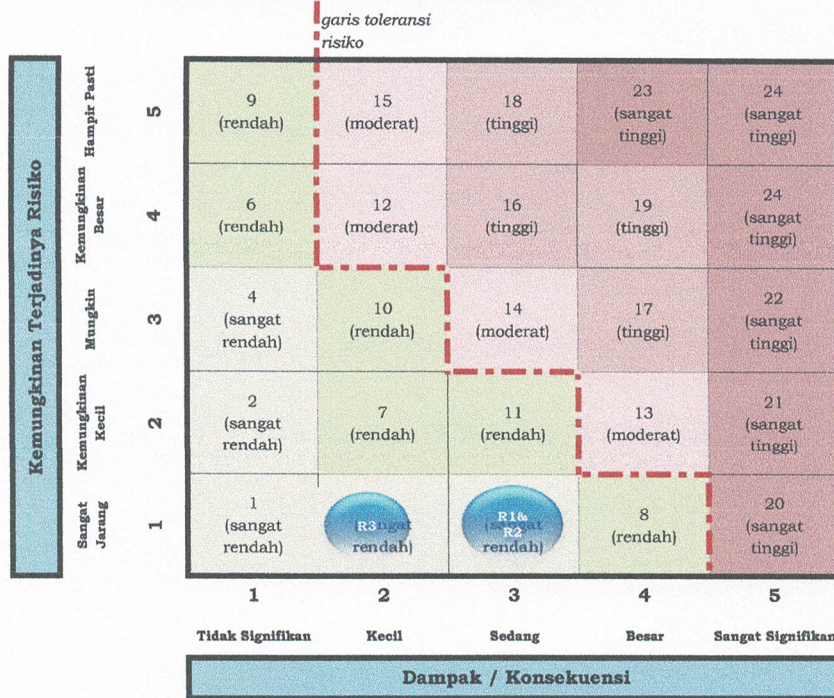
**Sub Kegiatan 4.7 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia**



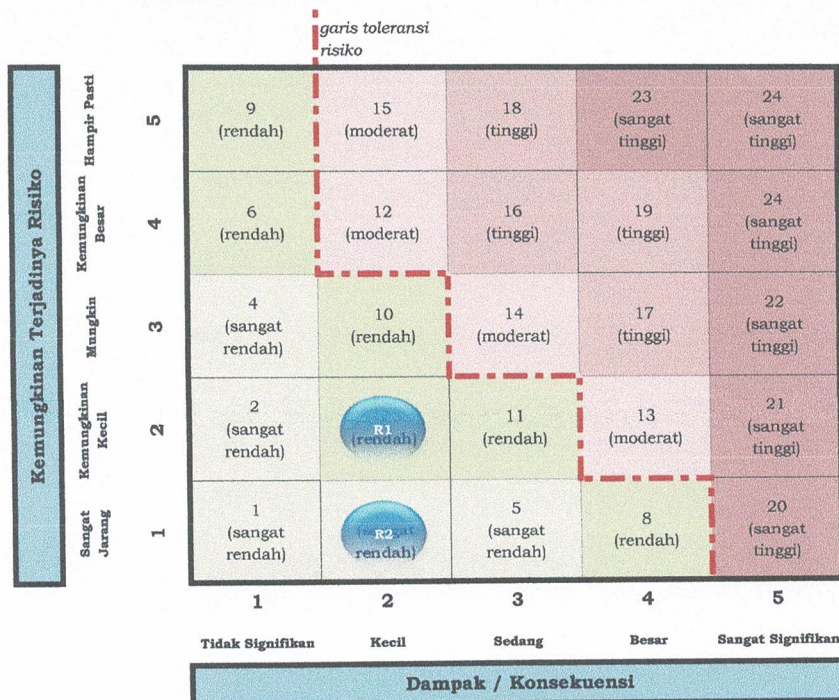
**Sub Kegiatan 4.8 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia**



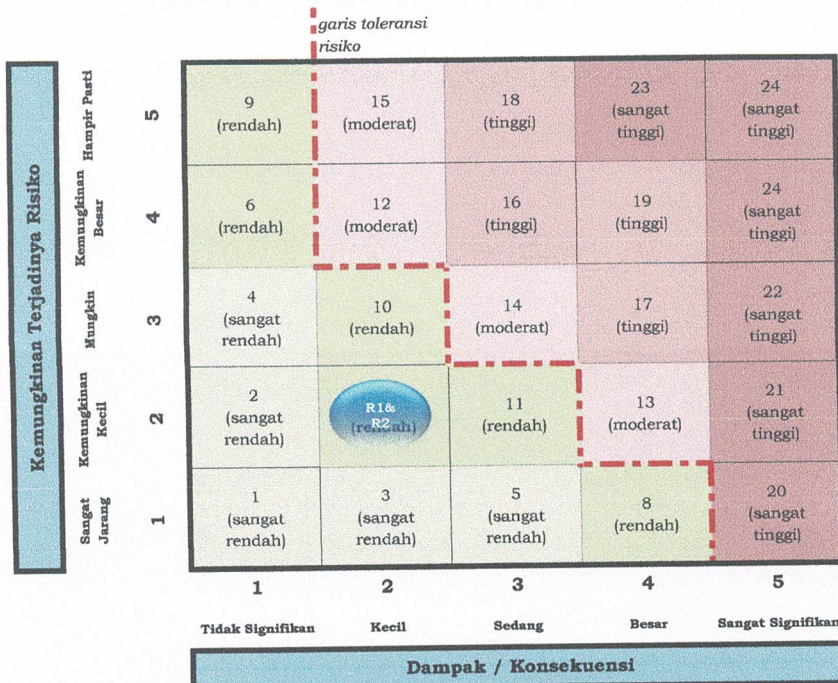
**Sub Kegiatan 5.1 : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**



**Sub Kegiatan 5.2 : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian**

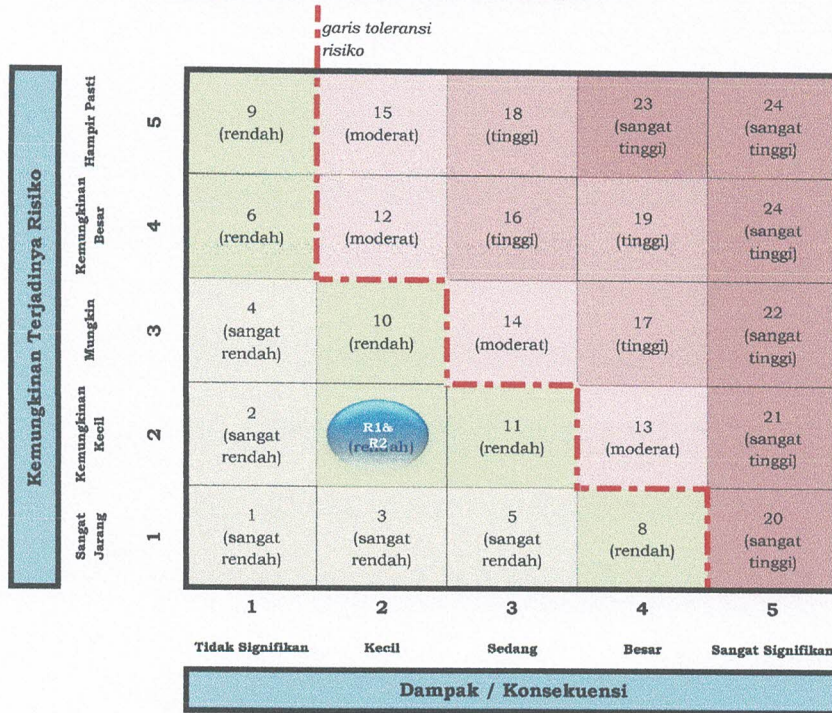


**Sub Kegiatan 5.3 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian**

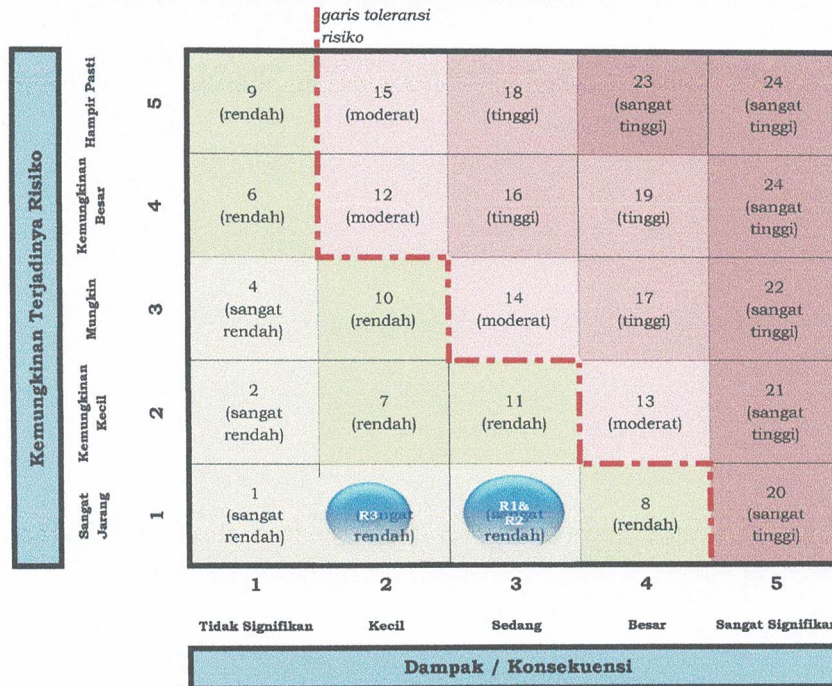




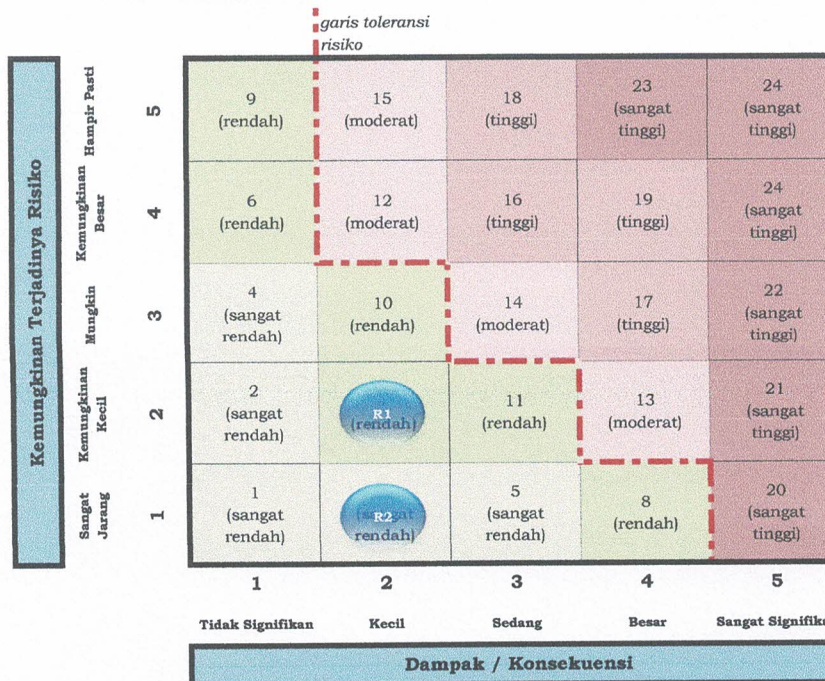
**Sub Kegiatan 5.7 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA**



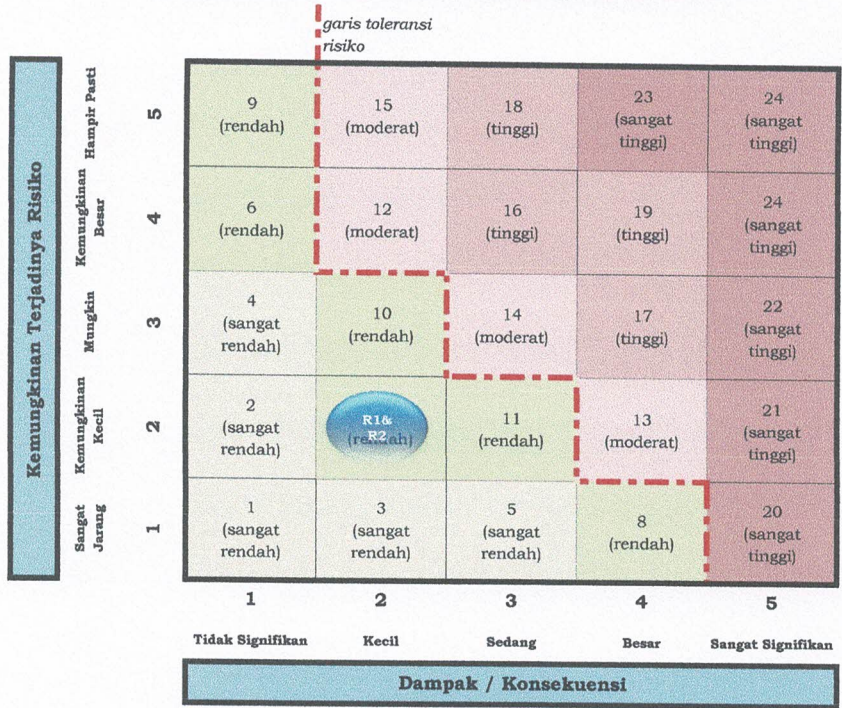
**Sub Kegiatan 6.1 : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**



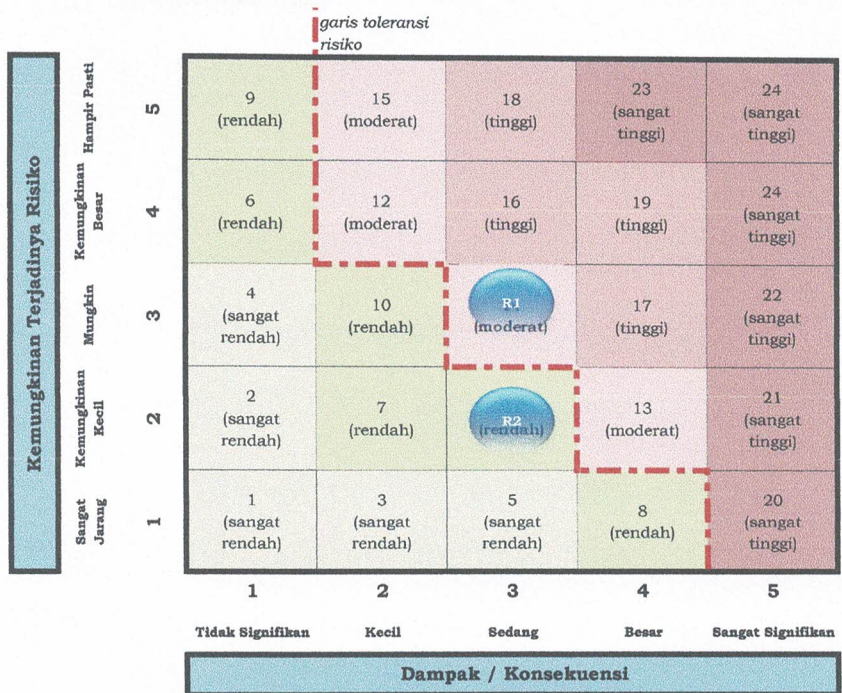
**Sub Kegiatan 6.2 : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur**



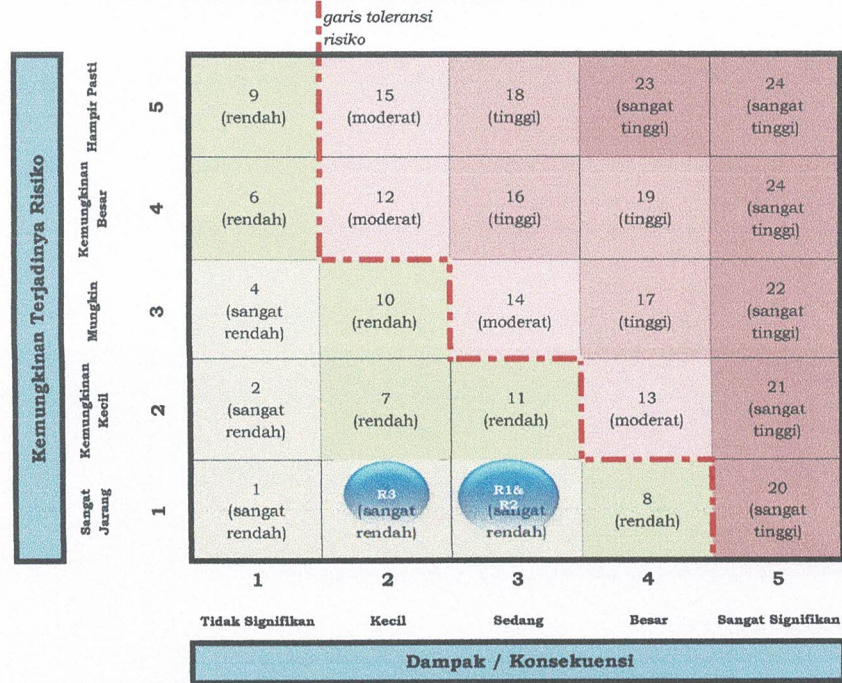
**Sub Kegiatan 6.3 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur**



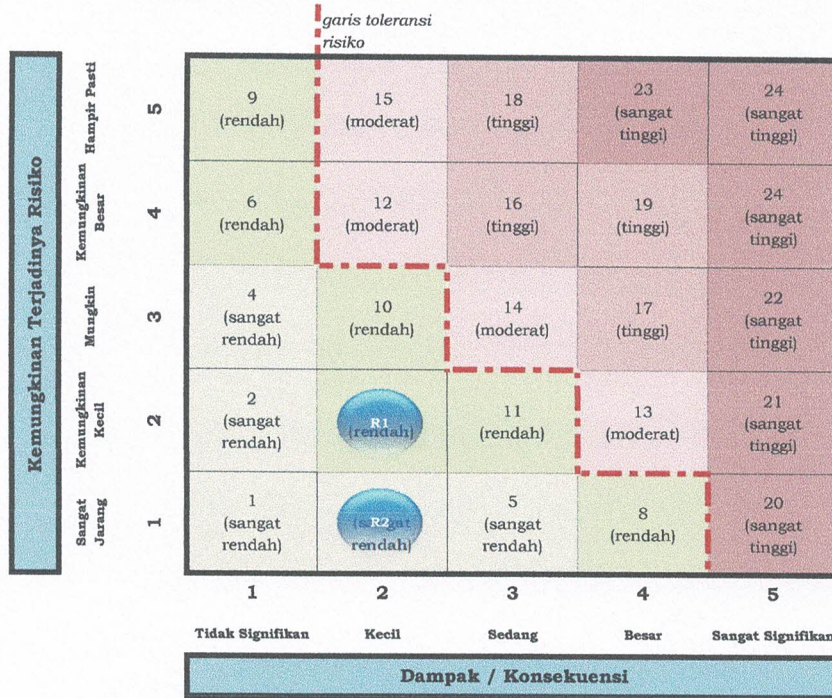
**Sub Kegiatan 6.4 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur**



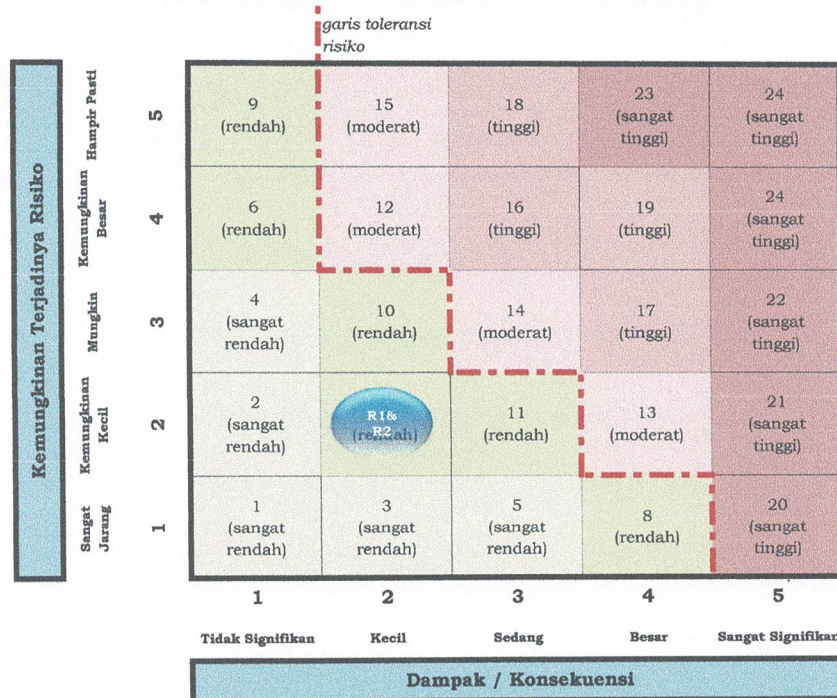
**Sub Kegiatan 6.5 : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)**



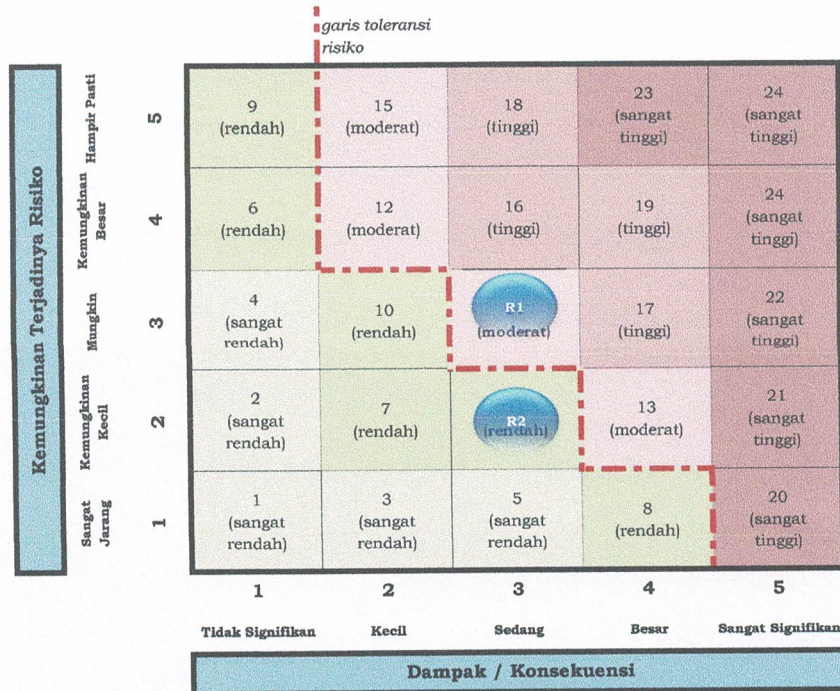
**Sub Kegiatan 6.6 : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan**



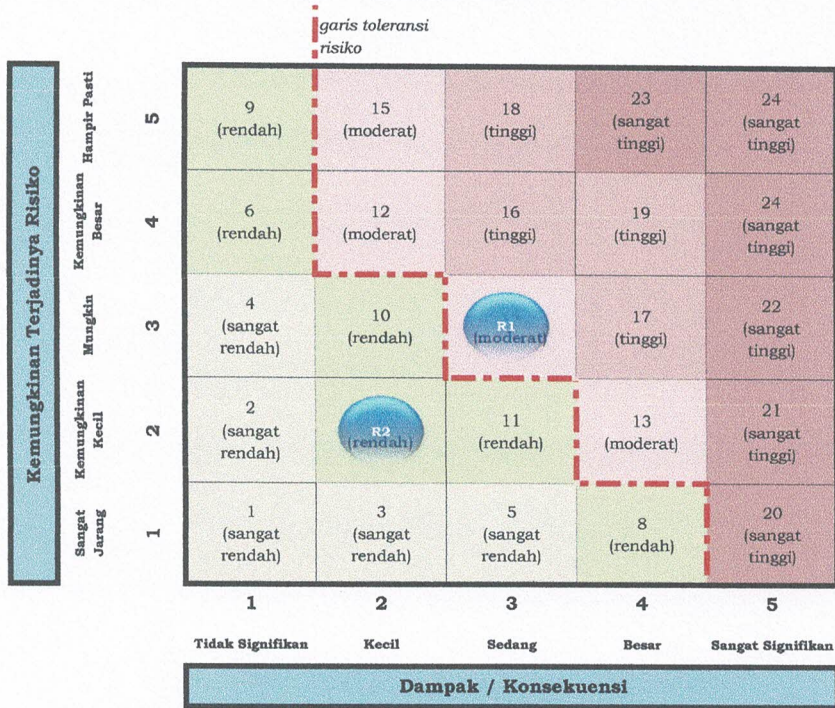
**Sub Kegiatan 6.7 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan**



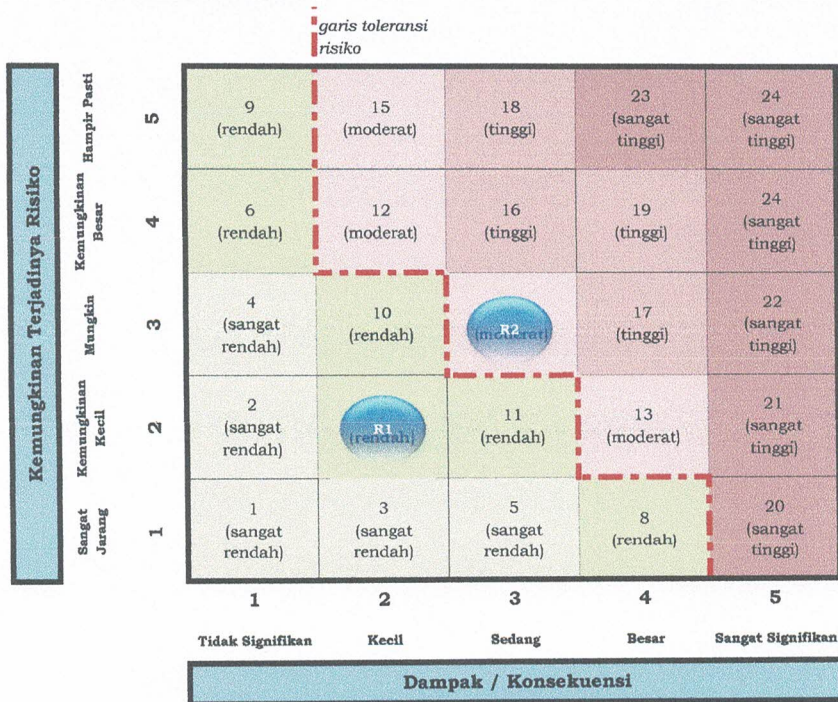
**Sub Kegiatan 6.8 : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan**



**Sub Kegiatan 7.1 : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan**



**Sub Kegiatan 8.1 : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif**



**Sub Kegiatan 8.2 : Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan**

